KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0091474
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT TIMAH Tbk**

Kepada Yth.
Notaris RINI YULIANTI S.H..
KOMPLEK BINA MARGA II, JL. SWAKARSA V NO.57B
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI S.H., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Juli 2023, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, **PT TIMAH Tbk**, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132543.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 13 Juli 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH.
Jakarta,

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur

NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT TIMAH Tbk
(S A L I N A N)
Tanggal : 13 JULI 2023.
No : 6.-

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544, Fax. (021) 8641170
E-mail : ninlek_not@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TIMAH Tbk

Nomor: 6.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli -- dua ribu dua puluh tiga). ----------

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu --- Indonesia Barat). ----------

-Berhadapan dengan saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum,** ------ **Notaris di Kota Jakarta Timur,** dengan dihadiri oleh saksi --- saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta ini; ----------

Tuan AHMAD DANI VIRSAL, lahir di Riau, pada tanggal ---- 25-04-1971 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus - tujuh puluh satu), Direktur Utama dari perseroan yang -- akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Menara -- Nomor 54, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, ---------- Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang; ---------- pemegang Nomor Induk Kependudukan [redacted] ---- yang berlaku seumur hidup; ----------

-Untuk sementara berada di Jakarta; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---- jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan -- atas nama serta sah mewakili **PT TIMAH Tbk, berkedudukan di Kota Pangkalpinang,** beralamat di Jalan Jenderal ----- Sudirman Nomor 51, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02, -- Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota ------- Pangkalpinang 33121, Kepulauan Bangka Belitung; yang --- anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan --------

dalam Berita Negara Republik Indonesia:----------

- tanggal 01-04-1977 (satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor 26, Tambahan Nomor 200; ----
- tanggal 28-10-1977 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor 86, Tambahan Nomor 200a; ----------
- tanggal 13-03-2009 (tiga belas Maret dua ribu sembilan) Nomor 21, Tambahan Nomor 7468; dan --------
- tanggal 28-09-2011 (dua puluh delapan September dua ribu sebelas) Nomor 77, Tambahan Nomor 29351; -------

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ---- perubahan mana dimuat dalam akta-akta:----------

- tanggal 26-06-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas) Nomor 75; Akta perubahan mana telah ---- mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --- Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-06-2014 ---- (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas) Nomor ---- AHU-03464.40.21.2014; ----------
- tanggal 26-08-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu - empat belas) Nomor 31; Akta perubahan mana telah ---- mendapat: ----------
  - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-08-2014 (dua ---- puluh enam Agustus dua ribu empat belas) Nomor --- AHU-00124.40.21.2014; dan ----------
  - surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan ------ PT TAMBANG TIMAH ke dalam Perusahaan Perseroan --- (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH --------

(Persero) Tbk berkedudukan di Kota Pangkalpinang - dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 26-08-2014 (dua ---- puluh enam Agustus dua ribu empat belas) Nomor --- AHU-00006.40.43.2014; ----------

- tanggal 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu ---- lima belas) Nomor 47; Akta perubahan mana telah ----- mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --- Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-05-2015 ---- (dua puluh delapan Mei dua ribu lima belas) Nomor --- AHU-AH.01.03-0935421; ----------
- tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu - tujuh belas) Nomor 47; Akta perubahan mana telah ---- mendapat: ----------
  - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan surat ---------- keputusannya tertanggal 07-11-2017 (tujuh November dua ribu tujuh belas) Nomor ---------- AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017; dan ----------
  - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-11-2017 (tujuh -- November dua ribu tujuh belas) Nomor ---------- AHU-AH.01.03-0188415; ----------
- tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan November dua - ribu tujuh belas) Nomor 76; Akta perubahan mana ----- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat --- keputusannya tertanggal 12-12-2017 (dua belas -------

Desember dua ribu tujuh belas) Nomor ----------
AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------
- tertanggal 12-07-2018 (dua belas Juli dua ribu ------
delapan belas) Nomor 11; Akta perubahan mana telah --
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-07-2018 ----
(tiga belas Juli dua ribu delapan belas) Nomor ------
AHU-AH.01.03-00221752; ----------

Akta-akta mana seluruhnya dibuat di hadapan FATHIAH----
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ----------
- tertanggal 01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh)
Nomor 1, dibuat di hadapan saya, Notaris; Akta ------
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ------
03-07-2020 (tiga Juli dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020; ----------
- tertanggal 28-04-2021 (dua puluh delapan April dua --
ribu dua puluh satu) Nomor 40; dibuat di hadapan ----
saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat ---
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei -
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0298657;

Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta----
saya, Notaris tertanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu
dua puluh dua) Nomor 13; Akta perubahan mana telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya---

Nomor AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah-------
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan------
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0245855;-
keduanya tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua-
puluh dua).----------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 13-07-2023 (tiga---
belas Juli dua ribu dua puluh tiga) Nomor 4; Akta mana-
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia------
Republik Indonesia tertanggal 13-07-2023 (tiga belas---
Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor----------
AHU-AH.01.09-0139862 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari ----------
identitasnya. ----------
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan ------
terlebih dahulu dalam akta ini: ----------
-bahwa pada hari Kamis, tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni -
dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Ruang Timor, Lantai ---
Lobby Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan
Nomor 1, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan; ------
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ---
akta saya, Notaris tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 26. ----------
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan
ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1), ----
Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut **"POJK No.15/2020"**), --------
Direksi Perseroan telah melakukan: ----------

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**)------ sebagaimana Surat Perseroan Nomor---------- 0077/Tbk/PTH-0000/23-S9.3.1 tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga), perihal Pemberitahuan-- Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham------ Tahunan (**"RUPST"**) PT TIMAH Tbk (**"Perseroan"**) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);----------
2. Adapun Pengumuman untuk Rapat telah dimuat dalam------- website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan di- www.timah.com pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas----- April dua ribu dua puluh tiga) sedangkan Ralat--------- Pengumuman RUPS disampaikan pada tanggal 28-04-2023---- (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga) yang- dimuat dalam website Bursa Efek Indonesia, dan website- Perseroan. Selanjutnya Pemanggilan berikut susunan Mata Acara Rapat telah dimuat juga di website Bursa Efek---- Indonesia dan website Perseroan di www.timah.com pada-- tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua--- puluh tiga).----------

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau -- diwakili sebanyak 5.740.339.656 (lima miliar tujuh ratus ---- empat puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam --- ratus lima puluh enam) saham yang terdiri dari: ----------

1. Pemegang saham **Negara Republik Indonesia** sebanyak 1---- (satu) saham Seri A;----------
2. Pemegang saham **PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero)**, sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus-----

empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ---
ratus lima puluh satu) saham Seri B; dan----------

3. Pemegang saham **MASYARAKAT** sebanyak 899.285.704 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan---puluh lima ribu tujuh ratus empat) Saham Seri B;-------

yang merupakan 77,07% (tujuh puluh tujuh koma nol tujuh -----persen) dari 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat --puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 - ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi ---- kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-bahwa Rapat tersebut diadakan untuk menyetujui: ----------

- **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**------

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa dan wewenang oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata --- acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, -------- melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar ------- Perseroan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan- PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku penerima kuasa khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menyusun -- dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham -------- terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang ---

untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan -----
perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan -
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk --------
mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang-
berwenang. ----------
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --
tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara
yang menyetujui persetujuan perubahan Anggaran Dasar --------
Perseroan tersebut adalah sebanyak 5.740.332.556 (lima miliar
tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu -
lima ratus lima puluh enam) saham yang merupakan 99,9999% ---
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ----
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan-
hak suara yang sah, sehingga dengan demikian Rapat dengan ---
suara terbanyak memutuskan: ----------

1. **Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara--**
   lain:----------
   a. **Dalam rangka penyesuaian/penambahan hak Pemegang -**
      Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di -
      Perseroan, sehubungan dengan telah diterbitkannya
      Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 (dua ribu
      dua puluh dua) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor
      46 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); serta ----
   b. **Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan di ------**
      lingkup Badan Usaha Milik Negara; ----------

sesuai dengan usulan dari PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, -
sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada-------

Pemegang Saham Perseroan.----------

2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan**----
dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan-------
perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 keputusan ------
tersebut di atas, termasuk pernyataan kembali Susunan--
Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut;-------

a. **Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1** ----
(satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna. ----------

b. **PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki** -
sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus
empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu -------
Sembilan ratus lima puluh satu) lembar Saham Seri
B; dan ----------

c. **Masyarakat memiliki sebanyak 2.606.699.502 (dua** --
miliar enam ratus enam juta enam ratus Sembilan --
puluh sembilan ribu lima ratus dua) lembar Saham -
Seri B. ----------

-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Pasal-Pasal yang disesuaikan adalah sebabagi berikut: ----------

- Pasal 5 ayat (4) tentang **SAHAM;**----------
- Pasal 11 ayat (1) dan (28) tentang **DIREKSI;**----------
- Pasal 12 ayat (2) huruf b; ayat (7) romawi ii dan iii;-
dan ayat (16) huruf a, b dan c tentang **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKSI;**----------
- Pasal 13 ayat (7), ayat (8), dan ayat (12) tentang-----
RAPAT DIREKSI;----------
- Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b; ayat (22); dan ayat---
(29) tentang **DEWAN KOMISARIS;**----------
- Pasal 16 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (10)---
tentang **RAPAT DEWAN KOMISARIS;**----------

- Pasal 17 ayat (1) tentang **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN;**
- Pasal 18 ayat (2) dan ayat (8) tentang **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN;** dan
- Pasal 19 ayat (3) tentang **PELAPORAN;**

serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

(1) Perseroan Terbatas ini bernama **PT TIMAH Tbk,** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan **"Perseroan"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 02-08-1976 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 05-02-1977 (lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

(1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di-

bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, ------- pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan bidang---- usaha pertambangan serta optimalisasi pemanfaatan------ sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan- barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya--- saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna----- meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip- prinsip Perseroan Terbatas. ----------

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama------ sebagai berikut: ----------

a. Pertambangan Bijih Timah (KBLI 07291); ----------

b. Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak ----- Mengandung Bijih Besi (KBLI 07299); ----------

c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL (KBLI --- 08999); ----------

d. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);

e. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI -- 24202); ----------

f. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (KBLI ----- 24203); ----------

g. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI ---- 46620); ----------

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada-- ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha----- penunjang/ pendukung dalam rangka optimalisasi--------- pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tidak terbatas-- untuk : ----------

a. Pertambangan Bijih Uranium dan Torium (KBLI ------ 07210); ----------

b. Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium ----
(KBLI 24206); ----------
c. Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301); --------
d. Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya (KBLI -----
07309); ----------
e. Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa (KBLI 08995); -----
f. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian --
Lainnya (KBLI 09900); ----------
g. Pengerukan (KBLI 42914); ----------
h. Penyiapan Lahan (KBLI 43120); ----------
i. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI
(KBLI 71102); ----------
j. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100); ----------
k. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); -------
l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI -----
70209); ----------
m. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202); --------
n. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209); ----
o. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan ----
(KBLI 42912); ----------
p. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (KBLI -----
42919); ----------
q. Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41017); -------
r. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa -----
(KBLI 68111); ----------
s. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI ------
49432); ----------
t. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus ---
(KBLI 50133); ----------
u. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus ----

(KBLI 50142); ----------

v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI ----- 52221); ----------

w. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222); ----------

x. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya ---- (KBLI 52229); ----------

y. Angkutan Multimoda (KBLI 52295); ----------

z. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (KBLI -- 52299); ----------

aa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391); ----------

bb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (KBLI 77399); ----------

cc. Industri Mesin, Penambangan, Penggalian dan ------ Konstruksi (KBLI 28240); ----------

dd. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI ------ 33122); ----------

ee. Kawasan Industri (KBLI 68130); ----------

ff. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101); --------

gg. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109);

hh. Pengumpulan Limbah Berbahaya (KBLI 38120); -------

ii. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI -- 38220); ----------

jj. Museum Yang Dikelola Swasta (KBLI 91022); --------

kk. Taman Wisata Alam (KBLI 91034); ----------

ll. Wisata Petualangan Alam (KBLI 93223); ----------

mm. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya (KBLI 93229); -----

nn. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya -- (KBLI 93239); ----------

oo. Taman Rekreasi (KBLI 93211); ----------

pp. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) - (KBLI 91031); ----------

qq. Wisata Agro (KBLI 93231); ----------

rr. Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor ----- Kehutanan (KBLI 02401); ----------

ss. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI - 55199); ----------

tt. Pembibitan dan Budidaya Rusa (KBLI 01494); -------

uu. Penangkaran Mamalia (KBLI 01722); ----------

vv. Budidaya Ayam Ras Petelur (KBLI 01462); ----------

ww. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (KBLI 01411);

xx. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya ---- (KBLI 01469); ----------

yy. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (KBLI 01131);

zz. Pertanian Hortikultura Buah (KBLI 01132); --------

aaa. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (KBLI 01133);

bbb. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (KBLI - 01220); ----------

ccc. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam (KBLI 03221);--

ddd. Penangkaran Reptil (KBLI 01723);----------

eee. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya (KBLI----- 01729); ----------

fff. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu,---- Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya (KBLI 47781); ----------

ggg. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit,--- Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan --

yang Diawetkan (KBLI 47782); ----------

hhh. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam----
(KBLI 47783); ----------

iii. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik--
(KBLI 47784); ----------

jjj. Perdagangan Eceran Lukisan (KBLI 47785);----------

kkk. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan---
Lainnya (KBLI 47789); ----------

lll. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
(KBLI 47243); ----------

mmm. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan (KBLI---
47245); ----------

nnn. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya (KBLI 47249);--

ooo. Perdagangan Eceran Tekstil (KBLI 47511);----------

ppp. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari-
Tekstil (KBLI 47512); ----------

qqq. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang-----
Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di -------
Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 47111); -

rrr. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang-----
Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di -
Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) -
(KBLI 47112); ----------

sss. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang-----
Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di -
Toserba (*Department Store*) (KBLI 47191); ---------

ttt. Restoran (KBLI 56101); ----------

uuu. Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303); ----------

vvv. Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) (KBLI ------
08915); ----------

www. Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk-Lainnya (KBLI 08919); ----------

xxx. Pertambangan Pasir Besi (KBLI 07101); ----------

yyy. Pertambangan Bijih Besi (KBLI 07102); ----------

zzz. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya ---- (KBLI 37022); ----------

aaaa. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak - Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696); ----------

bbbb. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer -- Lainnya (KBLI 62090); ----------

cccc. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan -- Sendiri (KBLI 61992); ----------

dddd. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk --- Prasarana Transportasi (KBLI 42205); ----------

eeee. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212); ----------

ffff. Fasilitas Lapangan (KBLI 93114); ----------

gggg. Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019); ----------

hhhh. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus (KBLI 68112). ----------

----------**M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

(1) Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp500.000.000.000,00- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas: ----------

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan ----------

b. 9.999.999.999 (sembilan miliar sembilan ratus ---- sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ------ sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ------ sembilan puluh sembilan) saham Seri B; ----------

masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar------- Rp50,00 (lima puluh Rupiah).----------

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak lebih kurang 74,47%------ (tujuh puluh empat koma empat tujuh persen) atau------- sejumlah 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat-puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat) saham dengan nilai nominal----- seluruhnya sebesar Rp372.387.672.700,00 (tiga ratus---- tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh-- juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus------- Rupiah) yang terdiri dari:----------

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai ------ nominal seluruhnya Rp50,00 (lima puluh Rupiah); --

b. 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat ---- puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp372.387.672.650,00 (tiga ratus tujuh puluh dua - miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam -- ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh - Rupiah). ----------

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham-- yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya----- berjumlah Rp.372.387.672.700,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam---- ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah) telah--- diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing---- pemegang saham Perseroan.----------

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal,- penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam----
bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud-----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-
berikut:----------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud -
wajib diumumkan kepada publik pada saat ----------
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya
Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai
penyetoran tersebut; ----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib -
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas --
Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan
disingkat OJK) dan tidak dijaminkan dengan cara --
apapun juga; ----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --------
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1); ------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ---
modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan -----
terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau ------
perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, ---
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai -
pasar wajar; dan ----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba --
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ------
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, -
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur-
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam-
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK -----
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. --------

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-- Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu--- dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang------- ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS,- terkait harga RUPS dapat mendelegasikan kewenangan----- penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan--------- mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran----- Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta------- ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di-------- Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.----------

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek------- Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek---- yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang--------- mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan--- selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai--- berikut:----------

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek - Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan --------- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ------ (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang - menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang --- telah terdaftar dalam daftar pemegang saham ------ Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing - pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib ------- mengumumkan informasi rencana penambahan modal ---

dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham ----
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang-
Pasar Modal. ----------

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang ------
berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek ---
bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada ---
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ---------
pengeluaran saham: ----------

b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; ---------

b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, ---
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan---
RUPS; ----------

b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
restrukturisasi yang telah disetujui oleh---
RUPS; dan/atau ----------

b.4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik-----
Indonesia selaku pemegang saham Seri A------
Dwiwarna. ----------

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam ---
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam --------
peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD --
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---
yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, -----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ----
ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat
ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat -----

ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib --------
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang --
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham ---
yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ------
ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang --
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d
pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan
kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai -----
pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama. -

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, -
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS ----
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui --------
pengeluaran Efek tersebut. ----------

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai Hak yang sama dengan saham yang --------
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ----
Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
(selanjutnya Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi
Manusia disingkat Menteri di bidang Hukum). -----

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan-
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar---
ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui-
oleh Menteri di bidang hukum, dengan ketentuan:--------

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang hukum;

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang hukum;

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a. 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan

besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% - (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan ----- mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan -- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak - mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari ---- Menteri di bidang hukum atas pelaksanaan --------- penambahan modal disetor tersebut. ----------

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek------- Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan------- tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan- khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa---- Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan------- menentukan lain.----------

(9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus-------- dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan------- keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang-- saham Seri A Dwiwarna.----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

(1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar------- Pemegang Saham yang terdiri dari :----------

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat ---- dimiliki Negara Republik Indonesia dan ----------
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara ----- Republik Indonesia dan/atau masyarakat. ----------

(2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham"-- ialah saham Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang----

dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham-- Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali----- apabila dengan tegas dinyatakan lain.----------

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum- sebagai pihak yang berwenang menjalankan Hak yang------ diberikan oleh hukum atas saham.----------

(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak --------- ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A ------ Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak - yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 - (satu) hak suara. ----------

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya -- hak-hak istimewa dan hanya dimiliki khusus oleh -- Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna. ----------

c. Hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna ------ adalah: ----------

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan --- termasuk mengenai hal sebagai berikut: ------

c.1.1. Persetujuan pengangkatan dan----- pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -------

c.1.2. Persetujuan perubahan---------- Anggaran Dasar ini; ----------

c.1.3. Persetujuan perubahan struktur--- kepemilikan saham; ----------

c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan--------- pembubaran serta pengambilalihan-

Perseroan perusahaan lain; -------

c.2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; ------

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; ----------

c.5. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perseroan dalam bidang sebagai berikut : ----------

c.5.1. Bidang akuntansi dan keuangan; ---

c.5.2. Bidang pengembangan dan investasi; ----------

c.5.3. Bidang operasional dan pengendalian mutu; ----------

c.5.4. Bidang pemasaran dan komersial; --

c.5.5. Bidang informasi teknologi; ------

c.5.6. Bidang pengadaan dan logistik; ---

c.5.7. Bidang sumber daya manusia; ------

c.5.8. Bidang tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan internal; --

c.5.9. Bidang hukum, kepatuhan dan penanganan permasalahan hukum; ---

c.5.10. Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial; -

c.5.11. Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); -----

c.5.12 Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; -------

dan/atau ----------

c.5.13 Bidang lainnya. ----------

c.6. Hak untuk melakukan pemeriksaaan/reviu, ----- memberi masukan, meminta informasi, --------- memberikan persetujuan, melakukan penetapan- dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan------ indikator kinerja kunci (*key performance*---- *indicator*) yang dilampirkan di dalamnya, ---- sebagai syarat pengangkatan Direksi-------- Perseroan; ----------

c.7 Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran---- Dasar Perseroan; ----------

c.8 Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan---- dan/atau mensinergikan fungsi untuk--------- Perseroan berdasarkan perjanjian---------- dengan/kuasa dari Perseroan pada bidang----- bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5-- Pasal ini; ----------

c.9 Hak untuk melakukan sinergi pengawasan------ terhadap kegiatan operasional maupun-------- strategis Perseroan; ----------

c.10 Hak melakukan pengendalian atau pemantauan-- terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perseroan; --------

c.11 Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu------- memberi masukan, meminta informasi, dan----- menyetujui Rencana Jangka Panjang---------- Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran------ Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta--

perubahannya yang disampaikan oleh Dewan----
Komisaris Perseroan; dan----------

c.12 Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai -- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan. ----------

d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam -- ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri B --- mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan -- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna sebagaimana huruf c ayat ini dapat dikuasakan kepada pemegang saham seri B dengan --- kepemilikan sebagian besar saham Perseroan ------- (selanjutnya disebut **Pemegang Saham Seri B ------- Terbanyak)**, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf c.1.4. ----------

(5) Jikalau suatu saham pindah tangan didasarkan suatu----- sebab menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka---- mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan-- untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang-------- ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka------ bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada----- saham tersebut.----------

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk--------- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan--------

mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan-------
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-----
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-

(7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil----dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang--------undangan.----------

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada----Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di-----bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat--dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----------

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam ------Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ---------

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan --Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, ---maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian --dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ---dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. ------

(2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,--sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang---Pasar Modal dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di

tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau----- lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.-

(4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----------

b. Nomor surat saham; ----------

c. Tanggal pengeluaran surat saham; ----------

d. Nilai nominal saham. ----------

(5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus----- dicantumkan:----------

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----------

b. Nomor surat kolektif saham; ----------

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --------

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; ----

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang ---------- bersangkutan. ----------

(6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi----- konversi, waran, dan/atau efek lain yang dapat--------- dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan--- dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris------ Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal---- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka--- oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang-- anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama--- dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu--- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota----- Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak--- langsung pada surat saham, surat kolektif saham,-------

obligasi konversi, waran, atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 7

(1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;

c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; ----------

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----------

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh ----- Direksi Perseroan; dan ----------

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang --- hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat --- dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu ---- paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ------ pengeluaran pengganti surat saham. ----------

(3) Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan,---- maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku--- lagi bagi Perseroan.----------

(4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.----

(5) Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai---------- pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk--- pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek--- Bersifat Ekuitas.----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

(1) Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif------- berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:----------

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ------ Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam - buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ----------

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --- dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek -- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ------- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam -- buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama --- Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ----- investasi kolektif tersebut; ----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ------ konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan -------- Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a -- ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti ------- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ------ Perseroan; ----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -------- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham -------- Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk -- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

Bank Kustodian dimaksud; ----------

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ------- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian - kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ----------

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ------- Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan - konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; ----------

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis - dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan ------- Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan - antara satu dengan yang lain; ----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -- hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta --- mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau -- jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar ---- benar sebagai pemegang saham dan surat saham ----- tersebut benar benar hilang atau musnah; ---------

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -------- dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ---- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ----------

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau --------- mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; ---

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---------

menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah - saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing - pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -------- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ---------- Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya -- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ----------

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan -- suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ------- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ------ Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio -- Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ------ kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ------ Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; ----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus - atau Hak lain sehubungan dengan pemilikan saham -- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas - saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - ---- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ------ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ---- menyerahkan dividen, saham bonus atau Hak lain --- kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek - untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus - atau Hak lain sehubungan dengan pemilikan saham --

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau Hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau Hak lainnya tersebut.

(2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

---------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

---------- **PASAL 9** ----------

(1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham-

dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat----- kedudukan Perseroan.----------

(2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; ----------

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang -- dimiliki para Pemegang Saham; ----------

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau --- sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran ----- jaminan fidusia tersebut; ----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain ---- selain uang; dan ----------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ------ Direksi. ----------

(3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-------- kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham- anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta----- tanggal saham itu diperoleh.----------

(4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan- tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda-------- penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu---- belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan---------- pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika---- dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling----- akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.----------

(5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara---- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.

(6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang---
Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di----
Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan--
pada waktu jam kerja.----------

(7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang--
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan-------
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu------
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau----
jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau--
hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai-
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang------
undangan di bidang Pasar Modal.----------

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak------
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di------
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat--
dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

(9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan,---------
pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau---
yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan--
dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang
berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada-------
Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk----
dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham,---
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan--
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta------
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana-----
saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

(1) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu------ saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar----- Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari----- saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut-- telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal-------- tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang------ undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta----- ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham---------- Perseroan dicatatkan.----------

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ------- ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang ---- memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang ---------- bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -- harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau ------ disetujui oleh Direksi. ----------

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam ---- Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Efek satu ke Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -- Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ------- ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh ----- Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di

tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan -- tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham ---- Perseroan dicatatkan. ----------

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk--- itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak--- dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang---------- disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. -

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan-- hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan--------- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan--------- memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari - kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran-- itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan--------- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan-- tersebut dicatatkan.----------

(5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek- di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap---- penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai--- dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham----- Perseroan dicatatkan.----------

(6) Setiap orang yang memperoleh hal atas suatu saham------ karena kematian seorang pemegang saham atau karena----- sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham---- beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti----- haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh-----

Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis-- untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham------- tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila---- Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak- itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.----------

(7) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas- saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus-- tunduk pada peraturan Pasar Modal.----------

(8) Pemegang saham yang melakukan permintaan---------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal-- 20 ayat (4) huruf a angka iii wajib tidak mengalihkan- kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit- 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan---------- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan-- Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.----------

(9) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang---- diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan-- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan- Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-------- jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan,------ sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang- diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.----------

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-

a. UUPT; ----------

b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal; dan ----------

c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku --- bagi Perseroan dan peraturan perundang-undangan -- lain yang terkait dengan kegiatan usaha ---------- Perseroan. ----------

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah----- orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:----------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang ----- baik; ----------

b. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan ---- selama menjabat: ----------

1) tidak pernah dinyatakan pailit; ----------

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi -------- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ------- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ------- perusahaan dinyatakan pailit; ----------

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara ------- dan/atau yang berkaitan dengan sektor ------- keuangan; ----------

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi -------- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ----------

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS ---- tahunan; ----------

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota -

Direksi dan/atau anggota Dewan --------
Komisaris pernah tidak diterima oleh --
RUPS atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota - --
Direksi dan/atau anggota Dewan --------
Komisaris kepada RUPS; dan ------------

c) pernah menyebabkan perusahaan yang ----
memperoleh izin, persetujuan, atau ----
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ---
kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -------
perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan --
dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh -
Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dan -
perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang -
yang dibutuhkan Perseroan; dan ------------------

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ---------
ditentukan dalam ayat (2) pasal ini. ------------

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat---
pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota------
Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada----------
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan
didokumentasikan oleh Perseroan.----------

(5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan--
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi--------
persyaratan.----------

(6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi-------

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal---
karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan--
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan----
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada-------
anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara-
tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang------
undangan yang berlaku.----------

(7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja----
terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi-
tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya----
atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya-------
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam---
media pengumuman dengan memperhatikan peraturan di-----
bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari---
sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak-----
memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri-
di bidang hukum untuk dicatat sesuai peraturan---------
perundang-undangan.----------

(8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas----
nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi
persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota------
Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab------
Perseroan.----------

(9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama-----
Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi-----
persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana--
dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah dan-
menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang----
bersangkutan.----------

(10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh---

RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan--- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.------ Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan---- dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan-------- pemberhentian sementara anggota Direksi.----------

(11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian - anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya-- pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian-- anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan- RUPS.----------

(12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu - terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ----- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ------ berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 --- (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan --- syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang -- undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa - jabatannya berakhir. ----------

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan --- RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain --- oleh RUPS. ----------

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota --- Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk --- satu kali masa jabatan. ----------

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.----------

(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana------- dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila---- berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang---------- bersangkutan antara lain:----------

a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang ---- telah disepakati dalam kontrak manajemen Direksi - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf - d; ----------

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau -- peraturan perundang-undangan; ----------

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan - dan/atau negara; ----------

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau - kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai ------ Direksi; ----------

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan -- yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; --------

g. Mengundurkan diri; dan/atau ----------

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi - kepentingan dan tujuan Perseroan; ----------

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana------ dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang- bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri,----- kecuali ayat (14) huruf f dan g.----------

(16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada-- ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan---------- pemberhentian dengan tidak hormat.----------

(17) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi-dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik---- menurut garis lurus maupun garis ke samping atau------- hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul----- karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.--

(18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada---- ayat (17) pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan----- salah seorang di antara mereka.----------

(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut--------- fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem-- dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya---- ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat------- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----------

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat---- satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:--------

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota --- Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan ---- anggota Direksi yang lowong tersebut dengan ------ kekuasaan dan wewenang yang sama. ----------

b. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan --------- perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku, -- RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan - lowong tersebut apabila menyebabkan anggota ------ Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah ------ satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong -- adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang - diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- --- undangan dan kebijakan yang berlaku. ----------

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud - pada huruf b . ----------

(21) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena terdapat------- anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS- belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi---- yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat----- ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya---- sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang-- yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi yang telah- berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1--- (satu) periode masa jabatan.----------

(22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka --- dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan -- RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ------ tersebut. ----------

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi - jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud - pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan ----- diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. ----------

(23) a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri -- dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---------- mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ----- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan ------- pengunduran diri secara tertulis mengenai -------- maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ------ memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --- Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --- setelah diterimanya surat pengunduran diri ------- tersebut. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi -- kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK ---- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: --------

i. diterimanya permohonan pengunduran diri ----- Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a -- ayat ini; dan----------

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ------ dimaksud dalam huruf b ayat ini.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai - dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ---------- perundang-undangan. ----------

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri -- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat --------- dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota - Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ----- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya -- dalam RUPS. ----------

f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari --- tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan ----- tanggung jawab dari RUPS Tahunan. ----------

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ------ sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi ---- menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----------

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ------ ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -- Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan - minimal jumlah anggota Direksi. ----------

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:----------

a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana --- dimaksud dalam ayat (23) huruf b; ----------

b. meninggal dunia; ----------

c. masa jabatannya berakhir; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; --------

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh - di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan -- pengadilan; atau ----------

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota -- Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini - dan peraturan perundang-undangan. ----------

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f-- termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan---- yang dilarang.----------

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun------ setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti----- karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib--- menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan---------- tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya- oleh RUPS.----------

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan------ alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan- Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan----

tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan------ kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi--- Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai------ berikut:----------

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus ---------- diberitahukan secara tertulis kepada anggota ----- Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang --- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan ---- Direksi; ----------

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a - disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian -------- sementara tersebut. ----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk - kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan --- tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. ----------

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ---- puluh) hari setelah pemberhentian sementara ------ dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan -- RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ---- pemberhentian sementara tersebut. ----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian ---- sementara tersebut menjadi batal. ----------

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak - keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----- Komisaris sampai dengan: ----------

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan----- atau membatalkan pemberhentian sementara---- pada huruf d; atau----------

2) lampaunya jangka waktu pada huruf d.--------

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, ---- anggota Direksi yang bersangkutan diberi --------- kesempatan untuk membela diri. ----------

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang - atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, - apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal - sebagaimana dimaksud pada huruf e. ----------

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara-- atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada --- huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan -- wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana -- mestinya. ----------

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. ----------

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan ------- sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi -- yang diberhentikan sementara tersebut dianggap --- tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya --- dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS. ----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi -- kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK ---- mengenai: ----------

1) keputusan pemberhentian sementara; dan------

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut---

atau menguatkan keputusan pemberhentian-----
sementara tersebut sebagaimana tersebut pada
huruf d, atau informasi mengenai batalnya --
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
karena tidak terselenggaranya RUPS sampai---
dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana---
dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2-----
(dua) hari kerja setelah terjadinya---------
peristiwa tersebut.----------

(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap------
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:----------

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, ---
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik ------
Swasta; ----------

b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas --
pada Badan Usaha Milik Negara; ----------

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada ---
instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;

d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD --
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau kepala
daerah/wakil kepala daerah; ----------

e. menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, ---
dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala --------
daerah/wakil kepala daerah; ----------

f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan -----
kepentingan;dan/atau ----------

g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ----
peraturan perundang-undangan. ----------

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk--
Dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan---------

persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.----------

---------- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang------ berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan-------- Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan---- maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, serta---- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar------- Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian------ dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan--- perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau-------- Keputusan RUPS.----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:----------

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: --

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat--- dalam kepengurusan Perseroan; ----------

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk- mewakili Perseroan di dalam dan di luar----- pengadilan kepada seorang atau beberapa----- orang yang khusus ditunjuk untuk itu-------- termasuk pekerja Perseroan baik sendiri----- sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan-- lain;----------

3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau------- jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi-- pekerja Perseroan berdasarkan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku; ----------

4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris;

6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ----------

b. Direksi berkewajiban untuk: ----------

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya ----- usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan -- maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; --

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka ----- Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan -------- Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan ------ persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan ---- Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini --- dapat ditetapkan setelah mendapatkan -------- persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -- atau kuasanya; ----------

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar ------- Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat ----- Direksi; ----------

4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain ---- berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud ------ pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, ---- serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; ----------

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di -- atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan - dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk - diaudit; ----------

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah --------

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka-- waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah - tahun buku Perseroan berakhir kepada-------- Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan- dalam RUPS;----------

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai-- Laporan Tahunan;----------

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi--- yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang hukum sesuai dengan ketentuan----- peraturan perundang-undangan;----------

9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan---- oleh ketentuan peraturan perundang---------- undangan, termasuk namun tidak terbatas pada laporan triwulanan dan tahunan terkait------ pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial--- dan Lingkungan;----------

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar---- Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan--- Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan------ sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen Perseroan lainnya;----------

11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan:---- Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,------- Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris- dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan-- dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;----------

12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan-----

administrasi Perseroan sesuai dengan--------
kelaziman yang berlaku bagi suatu----------
Perseroan;----------

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan-----
Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan--
prinsip-prinsip pengendalian intern,--------
terutama fungsi pengurusan, pencatatan,-----
penyimpanan, dan pengawasan;----------

14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan-
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,-
serta laporan lainnya setiap kali diminta---
oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham
Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan-------
peraturan perundang-undangan khususnya------
peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;----

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan-----
lengkap dengan perincian dan tugasnya;------

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal----
yang ditanyakan atau yang diminta anggota---
Dewan Komisaris dan/atau diminta Pemegang---
Saham Seri A Dwiwarna (yang dilakukan-------
melalui atau dikoordinasikan oleh kuasa-----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna), dengan-----
memperhatikan peraturan perundang undangan--
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal---
berlaku;----------

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya-----
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam---
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh-
RUPS.----------

18) Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak pemegang saham seri A Dwiwarna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.--

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.----------

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

(5) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.----------

(6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan: ----------

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;----------

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan--

maksud dan tujuan Perseroan;----------

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik---
langsung maupun tidak langsung atas--------
tindakan pengurusan yang mengakibatkan------
kerugian; dan----------

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah-----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-

(7) i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus ---
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan ---------
Komisaris: ----------

a) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau-------
mengagunkan aset Perseroan dengan nilai-----
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan----
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang-----
dicatat sebagai persediaan, dengan----------
memperhatikan peraturan di bidang pasar-----
modal;----------

b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau
pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi--
(KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama-----
lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate--
and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build,
Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik
(*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-
perjanjian lain yang mempunyai sifat yang---
sama yang jangka waktunya ataupun nilainya--
melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan----
Komisaris;----------

c) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----

d) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)-----

tingkat di bawah Direksi;----------

e) Melakukan penyertaan modal, melepaskan------ penyertaan modal termasuk perubahan stuktur- permodalan dengan nilai tertentu yang------- ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan--- lain, anak perusahaan, dan perusahaan------- patungan yang tidak dalam rangka---------- penyelamatan piutang dengan memperhatikan--- ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

f) Mendirikan anak perusahaan dan/atau--------- perusahaan patungan dengan nilai tertentu--- yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan------ memperhatikan peraturan di bidang Pasar---- Modal;----------

g) Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi--- calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris--- pada anak perusahaan yang memberikan-------- kontribusi signifikan kepada Perseroan------ dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan- oleh Dewan Komisaris.----------

h) Melakukan penggabungan, peleburan,---------- pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran-- anak perusahaan dan perusahaan patungan----- dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan- Komisaris dengan memperhatikan peraturan di- bidang Pasar Modal;----------

i) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg*--- *atau avalist*) dengan nilai tertentu yang---- ditetapkan Dewan Komisaris dengan---------- memperhatikan peraturan di bidang Pasar-----

Modal;----------

j) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang---
dan memberikan pinjaman jangka menengah/----
panjang dengan nilai tertentu yang----------
ditetapkan Dewan Komisaris dengan----------
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar-----
Modal;----------

k) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/
panjang yang tidak bersifat operasional,----
kecuali pinjaman kepada anak perusahaan-----
cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;----

l) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang
macet dan persediaan barang mati dalam nilai
yang melebihi batas yang ditetapkan oleh----
Dewan Komisaris;----------

m) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk---
dalam Transaksi Material sebagaimana--------
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu-
yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali----
tindakan tersebut termasuk dalam Transaksi--
Material yang dikecualikan oleh peraturan---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;---

n) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan-----
dalam RKAP;----------

o) Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan-
operasi produksi atau hak atas izin usaha---
pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang
sudah memasuki tahap operasi produksi.------

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan -----

dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), -- (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan ---- dan/atau kriteria tertentu serta huruf (d), (n), - dan (o) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna. ----------

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan --- Komisaris dalam ayat 7(i) dan 7(ii) pasal ini ---- dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna sebagaimana dimaksud pada poin (ii) dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf - (b) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka --- pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim ------ dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan --------- perundang-undangan, tidak memerlukan Dewan ------- Komisaris dan/atau RUPS. ----------

(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak----- diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen----- secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus----- memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.----------

(9) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:---------- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ---------- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)------ jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-------- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama----

lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan-usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.----------

(10) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat -----
dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan -------
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ------
mendapat persetujuan dari RUPS untuk: ----------

(1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk---
dalam transaksi material sebagaimana--------
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas--
50% (lima puluh persen) dari ekuitas--------
Perseroan, kecuali tindakan tersebut--------
termasuk dalam Transaksi Material yang------
dikecualikan oleh peraturan perundang-------
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

(2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan
kepentingan sebagaimana ditentukan dalam----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Pasar Modal.----------

(3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi------
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Pasar Modal.----------

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ---
diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen
dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan ---
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan ---
keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari ---
Dewan Komisaris. ----------

(11) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan -
ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap-

mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.----------

(12) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan ----- Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau------ menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang-- diatur dalam Anggaran Dasar ini.----------

(13) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi -- dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan--- Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.----------

(14) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan,------ setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak-- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan--- sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan---- Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan-------- Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada---- ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini. --

(15) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan---------- kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat- (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan--- baik di dalam maupun di luar Pengadilan.----------

(16) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada----- pihak ketiga, Direktur Utama menunjuk secara tertulis-- salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak---- untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas--- tugas Direktur Utama;----------

(17) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, --- maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan-------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta--

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;----------

(18) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih----- sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan--------- kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan- tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-------

(19) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ---- ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan-- pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian-- tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan-------- berdasarkan keputusan Direksi.----------

(20) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk - yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan-- dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran-- Dasar ini.----------

(21) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan ----- apabila:----------

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan -- dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau ---

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ------ kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan -- Perseroan. ----------

(22) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah:-------

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan dengan Perseroan; ----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; - atau ----------

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -----

seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

(1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala-- paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.--------

(2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan--- Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali--- dalam 4 (empat) bulan.----------

(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--- waktu apabila:----------

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -- Direksi; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris. ----------

(4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan- Pasal 12.----------

(5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara - tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari -- sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -- rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika --- dalam keadaan mendesak. ----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak ------- diperlukan untuk rapat-rapat yang telah ----------

dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi -- yang diadakan sebelumnya atau apabila semua ------ anggota Direksi hadir dalam rapat. ----------

(6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus---- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.--- Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan------- Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik- Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.------

(8) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,- maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara------- tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat------- Direksi.----------

(9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,--- maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan- sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.---

(10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai--- anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang,--- maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal- ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai------ pimpinan Rapat Direksi.----------

(11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan---- surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat------- mewakili seorang anggota Direksi lainnya.----------

(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara------ tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan------ kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi------ lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut,-----

mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung------ terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini---- akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh-- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah------- anggota Direksi.----------

(14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka-------- dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu)------ usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)-- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan------ musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan--- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang------- bersangkutan.----------

(16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya----- dengan sah dalam rapat tersebut.----------

(17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang --- diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap---- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah--- suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan----- pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara----

lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada---
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-

(19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah ----
Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -------
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi. ----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) --
wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah ----
Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -------
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan ---
anggota Dewan Komisaris. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ------
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri -
yang dilekatkan pada risalah rapat. ----------

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a --
dan huruf b wajib didokumentasikan oleh ----------
Perseroan. ----------

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah ---
untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang -
bersangkutan. ----------

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -- tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan -- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis serta menandatangani persetujuan -------- tersebut. ----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ------ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat- secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri---- rapat dengan melalui media telekonferensi, video------- konferensi, atau sarana media elektronik lainnya,------ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara- apapun, baik secara langsung maupun secara tidak------- langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,- kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana--------- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan- sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan----- karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau---- kontrak tersebut.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan -------- Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan ------ kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai -------

Komisaris Utama. ----------

b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan -------
Komisaris Independen. ----------
Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan --------
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. ----------

(2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota---
Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri,-
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-------

(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti----
ketentuan:----------

a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; --------

b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal; dan ----------

c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ---
bagi Perseroan dan peraturan perundang-undangan --
lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----
adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan---
pada saat diangkat dan selama menjabat:----------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan ----
selama menjabat: ----------

1) tidak pernah dinyatakan pailit; ----------

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi --------
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -------
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -------
perusahaan dinyatakan pailit; ----------

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3);

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.

(6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.

(7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

(9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi

tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang----
bersangkutan.----------

(11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris-dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,----- memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha------ Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain---------- berdasarkan peraturan perundang-undangan.----------

(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh---- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat----- tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A---- Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh--- RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri-A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.-------- Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan---- dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan-------- pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan----- Komisaris.----------

(13) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian-anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai----- berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.---- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan-pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai--- berlaku sejak penutupan RUPS.----------

(14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka

waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -------- penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -- tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ---------- memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ------ sebelum masa jabatannya berakhir. ----------

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota --- Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS - untuk satu kali masa jabatan. ----------

(15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat---------- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan-------- menyebutkan alasannya.----------

(16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila-- berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang---- bersangkutan antara lain:----------

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau -- peraturan perundang-undangan; ----------

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan - dan/atau negara; ----------

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau - kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai ------ anggota Dewan Komisaris; ----------

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -------

f. mengundurkan diri. ----------

(17) Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai----- dengan huruf f, anggota Dewan Komisaris dapat---------- diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan---- Perseroan.----------

(18) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana------ dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c,----- huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang---------- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam------ RUPS.----------

(19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian-- dengan tidak hormat.----------

(20) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota - Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada- hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau--- hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul----- karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar. -

(21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada---- ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah---- seorang di antara mereka.----------

(22) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris-- diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran------- tugasnya Dewan Komisaris wajib membentuk Sekretariat--- Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan---- Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.----------

(23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat----

satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong:------

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan - lowong tersebut apabila menyebabkan anggota ------ Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah ---- satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong - adalah Komisaris Utama. ----------

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud - pada huruf a. ----------

(24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh ----- jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka- untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat--- menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk- menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat - 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan,----- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan------ jabatan Dewan Komisaris tersebut.----------

(25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---------- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa --- jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara - tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ------ Perseroan; ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ------ memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --- Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri; ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi --

kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK ----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---------
diterimanya permohonan pengunduran diri anggota --
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -------
dimaksud dalam huruf b; ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap ----------
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ----
peraturan perundang-undangan; ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ----
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang ----------
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ---------
pengunduran dirinya dalam RUPS; ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS ----
Tahunan membebaskannya; ----------

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan ---
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan -
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ------
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota --
Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ---------
Komisaris. ----------

(26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -------

a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana ----

dimaksud ayat (25) huruf b; ----------

b. Meninggal dunia; ----------

c. Masa jabatannya berakhir; ----------

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau ----------

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh - di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan -- pengadilan; ----------

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota -- Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang-undangan lainnya. --------

(27) Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk------- tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang-------- dilarang.----------

(28) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum----- maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali-------- berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang- belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.---------

(29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan------ rangkap sebagai:----------

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, --- Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik ------ Swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha - Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B ------- Terbanyak; ----------

b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota --- DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota - dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ----

peraturan perundang-undangan; dan/atau ----------

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan -----
kepentingan. ----------

(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan------ tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS-- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang----- undangan.----------

---------- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN** ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap- kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya- baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang---- dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada- Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan------ Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan---- Anggaran Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi serta---- ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta- peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan-------- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan---------- Perseroan.----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:----------

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: ----------

1) memeriksa buku, surat, serta dokumen-------- lainnya, memeriksa kas untuk keperluan------ verifikasi dan lain-lain surat berharga dan- memeriksa kekayaan Perseroan;----------

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang

dipergunakan oleh Perseroan; ----------

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau ----
pejabat lainnya mengenai segala persoalan ---
yang menyangkut pengelolaan Perseroan; ------

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan ----
yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di-
bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi-
untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -----

6) mengangkat dan memberhentikan seorang -------
Sekretaris Dewan Komisaris; ----------

7) memberhentikan sementara anggota Direksi ----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -

8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi ---
dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan ----
komite-komite lain, jika dianggap perlu -----
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; --

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu --
dan dalam jangka waktu tertentu atas beban --
Perseroan, jika dianggap perlu. ----------

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan -----
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran --
Dasar ini. ----------

11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian ---
Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala ------
Satuan Pengawas Intern. ----------

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan -----
pandangan terhadap hal yang dibicarakan; ----

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya --

sepanjang tidak bertentangan dengan---------
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
ini, dan/atau keputusan RUPS.----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----------

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam-----
melaksanakan pengurusan Perseroan;----------

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana-
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta--
rencana kerja lainnya yang disiapkan--------
Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran---
Dasar ini;----------

3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,--
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS---
mengenai setiap masalah yang dianggap-------
penting bagi kepengurusan Perseroan;--------

4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A-----
Dwiwarna dan kuasa pemegang saham seri A----
Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya--
kinerja Perseroan dan/atau terdapat---------
permasalahan yang bersifat darurat dan------
strategis;----------

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan--
Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas-
buku Perseroan.----------

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan---
laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tahunan.----------

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran---
kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,-------
apabila diminta;----------

8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;----------

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;-

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.----------

11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.----------

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:----------

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran; ----------

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ----------

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

(5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

(1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi-

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4-----
(empat) bulan.----------

(4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu---
atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan---
Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang----
akan dibicarakan.----------

(5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh-
Komisaris Utama.----------

(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris--------
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan---
dipilih dalam Rapat tersebut.----------

(7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan
secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan --
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris ---
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex,
faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling --
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih --
singkat jika dalam keadaan mendesak. ----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak -------
diperlukan untuk rapat-rapat yang telah ----------
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----
Komisaris yang diadakan sebelumnya. ----------

(8) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus--
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat----------
rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat--------

kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(9) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

(10) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

(11) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

(12) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

(13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(14) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat-

tersebut.----------

(15) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang---diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap----tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah---suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

(16) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara----lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada---keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-

(17) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil---------berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan---berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,---maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara---berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan-----dalam rapat yang bersangkutan.----------

(18) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) --wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah ----Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -------kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada ------seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) --wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah ----Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -------kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan -----

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris ------- dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri - yang dilekatkan pada risalah rapat. ----------

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a -- dan huruf b wajib didokumentasikan oleh ---------- Perseroan. ----------

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk - pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ----------

(19) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan --- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris -- dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris --- telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai -- usul yang diajukan secara tertulis serta --------- menandatangani persetujuan tersebut. ----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ------ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -

(20) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat---------- menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan------ Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media-- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media---- elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang--------

berlaku.----------

(21) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi----- dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara- tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu------ transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam--- mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus------ dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi--- atau kontrak tersebut.----------

---------- **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 17** ----------

(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran------ Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang-------- sekurang-kurangnya memuat:----------

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan --- perusahaan, dan program kerja/kegiatan; ----------

b. Rencana kerja perusahaan; ----------

c. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap ------ anggaran program kerja/kegiatan; ----------

d. proyeksi keuangan Perseroan dan anak ---------- perusahaannya; ----------

e. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan ----- Perseroan; ----------

f. Manajemen risiko; ----------

g. Penjabaran rencana strategis Teknologi Informasi - Perseroan; ----------

h. Program kerja Dewan Komisaris; dan ----------

i. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan ----- Komisaris. ----------

(2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan-----
Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan---
dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang-
disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat----
(1).----------

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan-
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi-
disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30---
(tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau-
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang--
undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan----------
Komisaris.----------

(4) Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini, Rancangan-------
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui
oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh)----
hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran---
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang------
bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam---
peraturan perundang-undangan. Persetujuan Dewan--------
Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan---
setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A--
Dwiwarna atau kuasanya.----------

(5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran---------
Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau-----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui--
dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),--
maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun-------
sebelumnya yang diberlakukan.----------

---------- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

(1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap-----
tahun, buku Perseroan ditutup.----------

(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat-----
sekurang-kurangnya:----------

a. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ----------
b. ikhtisar data keuangan penting; ----------
c. informasi saham (jika ada); ----------
d. laporan Direksi; ----------
e. laporan Dewan Komisaris, termasuk laporan mengenai
tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama --
tahun buku yang baru lampau;; ----------
f. profil Perseroan; ----------
g. analisis dan pembahasan manajemen; ----------
h. tata kelola Perseroan; ----------
i. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan ----
lingkungan Perseroan; ----------
j. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; -----
k. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; ----------
l. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; --------
m. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, dan
gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi -----
anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru ----
lampau; ----------
n. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan ----
Tahunan; dan ----------
o. hal lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku. ----------

(3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas-- Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian- yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang------- disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat---- (2).----------

(4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan---- yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan---------- ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan- untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.---------

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan---- semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi- kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan----- setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan------- ketentuan yang berlaku.----------

(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris- tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus---- disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan------- tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.----------

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan-- Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan---- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi--- alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap----- telah menyetujui isi laporan tahunan.----------

(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan---

laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),---
dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir---
bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.---------

(9) Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan-------
laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba----------
ditetapkan oleh RUPS Tahunan.------------------------

(10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas
pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan-
keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan---------
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi---
dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan--------
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ----
yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam-----
laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan----
tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai----
dengan ketentuan yang berlaku.-----------------------

(11) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana--
dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat
Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan------
tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.---------------------

(12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk--
Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar---------
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut--
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang-
Pasar Modal.---

---------- **PELAPORAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat---
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.

(4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 20

(1) RUPS dalam Perseroan adalah:

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

(2) Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham atau Dewan Komisaris.

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas

permintaan: ----------

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ----------

ii. Dewan Komisaris; atau ----------

iii. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan - Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan - memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan --- peraturan perundang-undangan; ----------

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ----- diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat ---- disertai alasannya, dengan tembusan kepada Dewan - Komisaris. ----------

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ----- harus: ----------

1) dilakukan dengan itikad baik; ----------

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -------

4) tidak bertentangan dengan peraturan --------- perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. --

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan --- menurut penilaian Direksi telah memenuhi --------- persyaratan dalam huruf c. ----------

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal --------

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ------
dimaksud pada huruf a diterima Direksi. ---------

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ----------
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -- kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling -- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ------ tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris. ----------

h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ----- melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, -- Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: --

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS---- dari pemegang saham sebagaimana dimaksud---- dalam huruf a; ----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -------

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ----- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 ---- (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan --- penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham --------- sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f. --

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, ---- huruf g dan huruf h ayat ini paling sedikit ------ melalui: ----------

1) situs web penyedia e-RUPS; ----------

2) situs web Bursa Efek; ----------

3) situs web Perseroan ----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. ----------

k. Pengumuman pada huruf j dalam bahasa selain Bahasa Indonesia wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----------

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. ----------

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib: ----------

1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. ----------

2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai

dengan Peraturan OJK. ----------

3) melampirkan dokumen yang memuat nama --------
pemegang saham serta jumlah kepemilikan -----
sahamnya pada Perseroan yang telah ----------
memperoleh penetapan pengadilan untuk -------
menyelenggarakan RUPS dan penetapan ---------
pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 -
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS
tersebut. ----------

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling -- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ------ tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan: ----------

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ----
dari Dewan Komisaris yang tidak ----------
diselenggarakan; dan ----------

2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -------

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada huruf o di atas atau --- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ---------- terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan ----- sendiri RUPS. ----------

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima ----- belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --- sebagaimana dimaksud pada huruf o atau jangka ---- waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud -- pada huruf p ayat ini telah terlampaui. ----------

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ayat q ayat ini.

s. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

t. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 21** ----------

(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan, kecuali apabila OJK menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.

(2) Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;

b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan,

termasuk audit pengendalian internal atas --------
pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku
dari otoritas pasar modal di tempat saham --------
Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. ---------

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** ----------

---------- **PASAL 22** ----------

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan. ----------

------- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** ------

---- **DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----

---------- **PASAL 23** ----------

(1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ----------

(2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: ----------

a. tempat kedudukan Perseroan; ----------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; --------

c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau ----------

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini. ----------

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. ----------

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ----------

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. ----------

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n. ----------

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:
   1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
   3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   4) tanggal pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling sedikit melalui:
   1) situs web penyedia e-RUPS;
   2) situs web Bursa Efek; dan
   3) situs web Perseroan

   dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

e. Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi

pengumuman dalam Bahasa asing dengan yang --------
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. ---

g. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ---
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). ----

h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang -
mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan
mengikuti peraturan Pasar Modal. ----------

i. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n. --------

(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang---
Saham dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat
secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----------

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara -
Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: --

(1) Pemegang saham Seri A Dwi warna;----------

(2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau-----
lebih dari jumlah seluruh saham yang telah--
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang-
sah.----------

c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada

huruf a, harus: ----------

1) dilakukan dengan itikad baik; ----------

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata---- acara Rapat; dan----------

4) tidak bertentangan dengan peraturan--------- perundang-undangan. ----------

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham ------ sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata - acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c. ----------

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara --- rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud --- pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat -- dalam pemanggilan. ----------

(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai---- berikut:----------

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----- pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) - hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ----------

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: ----------

1) tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

2) waktu penyelenggaraan RUPS; ----------

3) tempat penyelenggaraan RUPS; ----------

4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir-- dalam RUPS; ----------

5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas---

setiap mata acara tersebut;----------

6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham---- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS- sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

7) informasi bahwa pemegang saham dapat-------- memberikan kuasa melalui e-RUPS.----------

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini paling sedikit melalui:

1) situs web penyedia e-RUPS;----------

2) situs web Bursa Efek; dan----------

3) situs web Perseroan;----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ----- sedikit bahasa Inggris.----------

d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa asing, wajib - memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia. ---

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ---- diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. ---

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan -------- mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal. -------

g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran --- Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh ------ Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang --- ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan ------ memperhatikan peraturan Pasar Modal. ----------

h. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e ---------- mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan ------- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---- telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ------ menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 20 ayat (4) huruf n. ----------

(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan------ sebagai berikut:----------

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka ---- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -- kedua dilangsungkan. ----------

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan --- RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak ------- mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku - tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan ------- peraturan perundang-undangan lainnya serta ------- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ----- Perseroan dicatatkan. ----------

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ---------- dilangsungkan. ----------

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c - sampai dengan huruf g dan ayat (11) mutatis ------ mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. ---

(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan----- sebagai berikut:----------

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. ----------

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e RUPS. ----------

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. ----------

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. ----------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: ----------

1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan ----------

2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----

dengan ketentuan peraturan perundang--------
undangan. ----------

(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS - jika terdapat perubahan informasi dalam ---------- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana di maksud dalam ayat (7) huruf b. ----------

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a memuat informasi atas ------ perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib ------ melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7). ---

c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---- acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ------ Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa ------- Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan ---------- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada - huruf b tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa --- Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan ----- pemanggilan ulang. ----------

d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c ------ disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat -- dilakukan ralat pemanggilan. ----------

e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c - dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media

ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a. ----------

---------- **PIMPINAN, TATA TERTIB, RISALAH RUPS DAN** ----------

---------- **RINGKASAN RISALAH RUPS** ----------

---------- **PASAL 24** ----------

(1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan------ sebagai berikut:----------

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---- hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin - oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk - oleh Direksi. ----------

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ----- anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, --- RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ---

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -- oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan - diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh --- anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah --- satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk

oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai ------- benturan kepentingan atas mata acara yang akan --- diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang ---- pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----------

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang ---- hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam -- RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa -- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ------ kepadanya. ----------

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib------ sebagai berikut:----------

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. ------

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ---- memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ----------

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; ------

2) mata acara rapat; ----------

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan----------

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-------- pendapat.----------

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan-- sebagai berikut:----------

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. ------ Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah ----- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga --- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. ----------

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang - pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ----------

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b --- tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut -- dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -- dibuat oleh notaris. ----------

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a -- dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling -- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS --------- diselenggarakan. ----------

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS --------- sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan --- paling lambat pada hari kerja berikutnya. --------

(4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan-- ketentuan sebagai berikut:----------

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi ---- paling kurang: ----------

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;------

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-

yang hadir pada saat RUPS;----------

3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;----------

4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;----------

5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;----------

6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-------

7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;----------

8) keputusan RUPS; dan----------

9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.----------

b. Ringkasan risalah RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:----------

1. situs web penyedia e-RUPS;----------
2. situs web Bursa Efek; dan----------
3. situs web Perseroan----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

c. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:

1. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
2. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS

PASAL 25

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -------

sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. ---

(3) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; ----------

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -

suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; ----------

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan ----------

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -------

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau

wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS. ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para - pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham - lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ------ bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak- suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang - saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------- sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ------- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan --- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. ---

(5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang- memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, -------- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS,

yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil --- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ------- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama - mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir - dalam RUPS. ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam RUPS ----- kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang -- saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ---- lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ------ keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A --- Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau- wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---- mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang hadir dalam RUPS. ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------- sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -------

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan --- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. ---

(6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang------ undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan--------- dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai--- berikut:----------

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan - para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil - mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ------ keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ------- dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS ---- kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang -- saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ---- lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ------ keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A --- Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham -- lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang-

bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per --- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------- sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ------- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan --- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. ---

(7) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan- 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS--- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan-- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan- dicatatkan.----------

(8) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana-------- dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang---- saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang----- saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.----------

(9) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan----- peraturan perundang-undangan.----------

(10) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa- secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan-- memberikan suara dalam RUPS.----------

(11) a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

(12) Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(13) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(14) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

(15) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota--

Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan--- dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.--

(16) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali------- apabila Ketua Rapat menentukan lain.----------

(17) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk--- mufakat.----------

(18) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk------- mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil---------- berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam-- Anggaran Dasar ini.----------

(19) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara--------- sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib dilakukan---- dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan---- kuorum keputusan RUPS.----------

(20) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang- pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.--------

(21) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-- tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara----- Elektronik.----------

---------- **PENGGUNAAN LABA** ----------

---------- **PASAL 26** ----------

(1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.--------

(2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan------ mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-- diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan,--- dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih---- yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk-

dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah------ dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain----- seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan --- anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan- dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu- dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk--- memutuskan lain.----------

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan-- kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali---------- ditentukan lain oleh RUPS.----------

(4) a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan - keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang ---- diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana - juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan - bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan - pembagian dividen tunai, Perseroan wajib --------- melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ----- pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. ----

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas - nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar ------- Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian -- dividen. ----------

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada pemegang saham. ----------

(5) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai, dengan ketentuan bahwa Direksi wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak sebelum meminta persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk pembagian lain tersebut. ----------

(6) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

(7) Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. -----

(8) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------

(9) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. --

(10) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. ----------

(11) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -----

tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh-----
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu-
per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan,-
dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan-------
kemampuan keuangan Perseroan.----------

(12) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan-------
keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan-
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).-------

(13) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata---------
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang-----
telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham-
kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris----------
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat--------
mengembalikan dividen interim pada ayat (11).----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 27** ----------

(1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan--------
lainnya.----------

(2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1)----
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang----
positif.----------

(3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan---
ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan-----
perundang-undangan. Penyisihan laba bersih untuk-------
cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai
cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua-----
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan---
disetor.----------

(4) Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum------

mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)-----
Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup-------
kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh------
cadangan lainnya.----------

(5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini----
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut,
maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana----
cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.--

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana--------
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang----
dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan----
peraturan perundang undangan.----------

(7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan--
dalam perhitungan laba rugi.----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **PASAL 28** ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan-------
Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau------
peraturan Pasar Modal.----------

(2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS------
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25--
ayat (4) dan ayat (5).----------

(3) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib------
dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.-------

(4) Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama,-----
tempat, kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan,--------
kegiatan usaha jangka waktu berdirinya Perseroan,------
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang----------
ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup-
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib-------

mendapat persetujuan dari Menteri di bidang Hukum------
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang-------
Perseroan Terbatas.----------

(5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan-dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.--------

(6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus----------
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor----
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar-harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau--------
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan------
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan---
RUPS tentang pengurangan modal tersebut.----------

---------- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** ----------
---------- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** ----------
---------- **PASAL 29** ----------

(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan--------
Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan--------
sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).---------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,----------
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah--------
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN** ----------
---------- **BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** ----------
---------- **PASAL 30** ----------

(1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan-------
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).----------

(2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.---------

(3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau---------- pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan- yang dilakukan.----------

(4) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di------ bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses-------- likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan---- pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.----------

(5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan---------- berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya-- ketentuan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **DOMISILI PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 31** ----------

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan ----- Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal --- pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang -- Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 32** ----------

-Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur --- dalam Anggaran Dasar ini mengikuti Undang-Undang Perseroan -- Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang ----- undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan --------- memperhatikan peraturan perundang-undangan. ----------

-Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -

menerangkan bahwa : ----------

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4--- ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :-------

a. **Negara Republik Indonesia** --
sebanyak 1 (satu) **saham** ----
Seri A Dwiwarna, dengan ---
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar ---------- **Rp. 50,00**
(lima puluh Rupiah); -------

b. **PT MINERAL INDUSTRI** --------
INDONESIA (Persero), -------
sebanyak **4.841.053.951** -----
(empat miliar delapan ratus-
empat puluh satu juta ------
lima puluh tiga ribu -------
sembilan ratus lima puluh --
satu) **saham Seri B**, --------
dengan nilai nominal -------
seluruhnya sebesar --------- **Rp.242.052.697.550,00**
(dua ratus empat puluh -----
dua miliar lima puluh dua --
juta enam ratus sembilan ---
puluh tujuh ribu lima ------
ratus lima puluh Rupiah); --

c. **MASYARAKAT** sebanyak --------
2.606.699.502 (dua miliar --
enam ratus enam juta enam --
ratus sembilan puluh -------
sembilan ribu lima ratus ---

dua) **saham Seri B,** ---------
dengan nilai nominal -------
seluruhnya sebesar --------- **Rp.130.334.975.100,00**
(seratus tiga puluh --------
miliar tiga ratus tiga -----
puluh empat juta sembilan --
ratus tujuh puluh lima -----
ribu seratus Rupiah); ------
Atau seluruhnya sebanyak --------
7.447.753.454 (tujuh miliar -----
empat ratus empat puluh tujuh ---
juta tujuh ratus lima puluh -----
tiga ribu empat ratus lima ------
puluh empat) saham, dengan ------
nilai nominal seluruhnya --------
sebesar ------------------------- **Rp.372.387.672.700,00**
(tiga ratus tujuh puluh dua -----
miliar tiga ratus delapan puluh -
tujuh juta enam ratus tujuh -----
puluh dua ribu tujuh ratus ------
Rupiah); ------------------------

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan --
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -------
pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan dari instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---
memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------
-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -------
membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan ------
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ----------

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal---
   01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam----
   puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
   tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun-----
   Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur,---
   Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
   3275084101690057.----------
   -Untuk sementara berada di Jakarta;----------
2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal-----
   17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus-
   enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat---
   tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
   Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat--
   Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk---
   Kependudukan 3174071711670009;----------

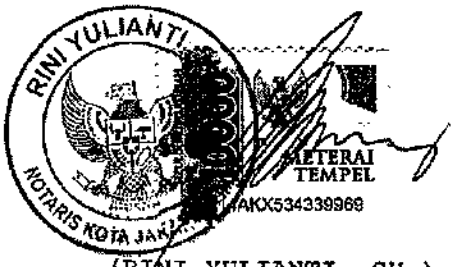
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini -- oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)

NOTARY PUBLIC

RINI YULIANTI, SH

Decree of Minister of Laws and Human Rights R.I

Number: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 dated 22nd February 2010

STATEMENT OF MEETING RESOLUTIONS

PT TIMAH Tbk

(COPY)

Dated : 13th JULY 2023

No. : 6

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone: (021) 8641170, 86909544, Fax: (021) 8641170

E-mail: niniek_not@yahoo.com

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

STATEMENT OF MEETING RESOLUTIONS

PT TIMAH Tbk

Number: 6.-

-On this day, Thursday, 13-07-2023 (the thirteenth day of July two thousand twenty-three).----------

-At 13.30 WIB (thirty minutes past thirteen, Western Indonesia Time).----------

-Appeared before me, RINI YULIANTI, Bachelor of Law, Notary Public in East Jakarta City, in the presence of witnesses known to me, the Notary Public and whose names will be mentioned at the end of this deed;----------

Mister AHMAD DANI VIRSAL, born in Riau, on 25-04-1971 (the twenty fifth day of April one thousand nine hundred and seventy one), President Director of company to be mentioned below, an Indonesian Citizen, residing in Pangkalpinang City, Jalan Menara Number 54, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 009, Community Unit of (Rukun Warga) 003, *Bukit Sari Village*, Gerunggang District, the holder of Resident National Identity Number: [redacted], valid for lifetime;----------

-Temporarily being in Jakarta;----------

-According to his statement, in this case, acting in his capacity as mentioned above, of and thereby for and on behalf of, and lawfully representing, **PT TIMAH Tbk, domiciled in Pangkalpinang City**, having its address

IKRI SAID OBED PENERJEMAH TERSUMPAH B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

at Jalan Jenderal Sudirman Number 51, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 08, Community Unit of (Rukun Warga) 02, Opas Indah Village, Taman Sari District, Pangkalpinang City 33121, Bangka Belitung Island; which the articles of association and any amendments thereto have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia:----------

- dated 01-04-1977 (the first day of April one thousand nine hundred and seventy-seven) under Number 26, Supplement Number: 200;----------
- dated 28-10-1977 (the twenty eighth day of October one thousand nine hundred and seventy-seven) under Number 86, Supplement Number 200a;----------
- dated 13-03-2009 (the thirteenth day of March two thousand nine) under Number 21, Supplement Number 7468; and----------
- dated 28-09-2011 (the twenty eighth day of September two thousand eleven) under Number 77, Supplement Number 29351;----------

The Articles of Association have been several times amended, which amendments are included in the following deeds:----------

- dated 26-06-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under Number 75; which amendment deed has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of

FIKRI AND OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 26-06-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under Number AHU-03464.40.21.2014;----------

- dated 26-08-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under Number 31; which amendment deed has been confirmed by:----------
  - the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 26-08-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under Number: AHU-00124.40.21.2014; and----------
  - the Letter of Receipt of Notification on the Merger of PT TAMBANG TIMAH into the Company (Persero) PT TIMAH Tbk, abbreviated to PT TIMAH (Persero) Tbk, domiciled in Pangkalpinang City, from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 26-08-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under Number: AHU-00006.40.43.2014;----------
- dated 27-05-2015 (the twenty seventh day of May two thousand fifteen) under Number 47; which amendment deed has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 28-05-2015 (the twenty eighth day of May two thousand fifteen) under Number: AHU-AH.01.03-0935421;------

- dated 26-10-2017 (the twenty sixth day of October two thousand seventeen) under Number 47; which amendment deed has been confirmed by:----------
  - Approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 07-11-2017 (the seventh day of November two thousand seventeen) under Number: AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017; and----------
  - the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 07-11-2017 (the seventh day of November two thousand seventeen) under Number: AHU-AH.01.03-0188415;
- dated 29-11-2017 (the twenty ninth day of November two thousand seventeen) under Number 76; which amendment deed has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of

FIRRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the Decree dated 12-12-2017 (the twelfth day of December two thousand seventeen) under Number: AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017;----------

- dated 12-07-2018 (the twelfth day of July two thousand eighteen) under Number 11; which amendment deed has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 13-07-2018 (the thirteenth day of July two thousand eighteen) under Number: AHU-AH.01.03-00221752;----------

The aforesaid deeds were entirely prepared before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta;----------

- dated 01-07-2020 (the first day of July two thousand twenty) under Number 1, prepared before me, the Notary Public; which amendment deed has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 03-07-2020 (the third day of July two thousand twenty) under Number AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020;----------
- dated 28-04-2021 (the twenty eighth day of April two thousand twenty-one) under Number 40, prepared before me, the Notary Public; which

FAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

amendment deed has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 07-05-2021 (the seventh day of May two thousand twenty-one) under Number AHU-AH.01.03-0298657;----------

The last amendment to the articles of association is included in deed prepared by me, the Notary Public dated 03-06-2022 (the third day of June two thousand twenty two) under Number 13; which amendment deed has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree Number: AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022, and has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0245855; both are dated 06-06-2022 (the sixth day of June two thousand twenty two).----------

The last Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners is included in deed prepared by me, the Notary Public, dated 13-07-2023 (the thirteenth day of July two thousand twenty three) under Number 4; which deed

FIKRI SHABOBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

has been confirmed by the Letter of Receipt of Notification on the Change of Data from the Ministry of Laws and Human of the Republic of Indonesia dated 13-07-2023 (the thirteenth day of July two thousand twenty two) under Number: AHU-AH.01.09-0139862 (hereinafter referred to as "the Company").----------

-The appearing person is known to me, the Notary Public, from his identity.----------

-The appearing person acting as mentioned above, first declares herein:----------

-that on Thursday, 15-06-2023 (the fifteenth day of June two thousand twenty three) at Ruang Timor, Lobby Floor of Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan Number 1, Central Jakarta, has been held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**the Meeting**") of the Company;----------

-that the Minutes of Meeting of the Company are included in deed prepared by me, the Notary Public, dated 15-06-2023 (the fifteenth day of June two thousand twenty three) under Number 26.----------

-that pursuant to the provisions of Article 23 paragraph (4), paragraph (5) and paragraph (7) of the Articles of Association of the Company and Article 13 paragraph (1), Article 14 paragraph (1) and Article

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

17 paragraph (1) of the Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Company (hereinafter simply called **"POJK No.15/2020"**), the Board of Directors of the Company have made:----------

1. Notification to the Financial Service Authority (**OJK**) as evidenced from the Company Letter Number: 0077/Tbk/PTH-0000/23-S9.3.1 dated 10-04-2023 (the tenth day of April two thousand twenty three), in the matter of Notification on the Plan and Holding of the Annual General Meeting of Shareholders (**"AGMS"**) of PT TIMAH Tbk (**"the Company"**) of the Fiscal Year 2022 (two thousand twenty two);----------
2. In addition, Announcement for the Meeting was published in the website of *Bursa Efek Indonesia* (Indonesian Stock Exchange), and the Company website at www.timah.com on 17-04-2023 (the seventeenth day of April two thousand twenty three) whereas the Rectified Announcement of the GMS was informed on 28-04-2023 (the twenty eighth day of April two thousand twenty three) published in the website of *Bursa Efek Indonesia*, and the Company website. Subsequently, Summons along with the Meeting Agenda was published also in the website of *Bursa Efek Indonesia* and the Company website at

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

www.timah.com on 24-05-2023 (the twenty fourth day of May two thousand twenty three).----------

-that at the Company Meeting, have been present and / or represented 5,740,339,656 (five billion seven hundred and forty million three hundred and thirty nine thousand six hundred and fifty six) shares comprised of:----------

1. Shareholder, being **the Republic of Indonesia**, 1 (one) Series-A Share;----------
2. Shareholder, being **PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero)**, 4,841,053,951 (four billion eight hundred and forty-one million fifty-three thousand nine hundred and fifty-one) Series-B Shares; and------
3. Shareholders, being **THE PUBLIC**, 899,285,704 (eight hundred and ninety-nine million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and four) Series-B Shares;----------

constituting 77.07% (seventy seven point zero seven percent) of 7,447,753,454 (seven billion four hundred and forty seven million seven hundred and fifty three thousand four hundred and fifty four) shares, being the whole shares subscribed for and paid up fully, and thereby the rule of quorum as set forth in the provision of Article 45 paragraph (1) of the Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Holding of the

ZAIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**") has been met, and therefore the Meeting fulfills the quorum and shall be entitled to adopt any valid and binding resolutions.----------

-that the Meeting was held to agree on:----------

- Approval for Amendment to the Articles of Association of the Company.----------

-that at the Meeting, the Board of Directors of the Company have been empowered and authorized by the shareholders to take any actions required, with respect to resolutions in the Meeting agenda, including but not limited to, make perfection on Amendment to the Articles of Association of the Company as required by making coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the special power recipient from the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*, to prepare and restate the whole Amendment to the Articles of Association in a Notarial Deed and state the last composition of shareholders, and submit request to appropriate agency to obtain approval for and / or receipt of notification on Amendment to the Articles of Association, and do anything deemed necessary and valuable for such needs without any exception, including to make Addendum and / or Amendment to the Articles of Association if required by appropriate agency.----------

YUKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

-Accordingly, on the basis of powers granted by the Meeting, the appearing person hereby declares that the number of votes that agree on the Approval for Amendment to the Articles of Association of the Company are 5,740,332,556 (five billion seven hundred and forty million three hundred and thirty two thousand five hundred and fifty six) shares constituting 99.9999% (ninety nine point nine-nine-nine-nine percent) of total valid voting shares being present, so that the Meeting on the basis of majority votes decides:----------

1. To Agree on Amendment to the Articles of Association of the Company, as follows:----------
   a. Adjustment to / addition of the rights of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* (which may be empowered) in the Company, due to the issuance of the Government Regulation Number 45 of 2022 (two thousand twenty two) in conjunction with the Government Regulation Number 46 of 2022 (two thousand twenty two); and----------
   b. Adjustment to the provisions of regulation within State-Owned Enterprise;----------

   in conformity with the proposal of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Proxy of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*, as submitted to the Company Shareholders.

2. To Agree to re-prepare all provisions of the Articles of Association with respect to the provision of amendment as referred to in point 1 as mentioned above, including the restatement of the Composition of Shareholders of the Company, as follows;

   a. **The Republic of Indonesia**, 1 (one) Series-A Share;

   b. **PT Mineral Industri Indonesia (Persero)**, 4,841,053,951 (four billion eight hundred and forty-one million fifty-three thousand nine hundred and fifty-one) Series-B Shares; and----------

   c. **THE PUBLIC**, 2,606,699,502 (two billion six hundred and six million six hundred and ninety-nine thousand five hundred and two) Series-B Shares;-----

-In relation to the above decisions, any adjusted Articles shall be as follows:----------

- Article 5 paragraph (4) regarding **SHARES**;----------
- Article 11 paragraphs (1) and (28) regarding **THE BOARD OF DIRECTORS**;----------
- Article 12 paragraph (2) b); paragraph (7) (ii) and (iii); and paragraph (16) a), b) and c) regarding **THE DUTIES, AUTHORITIES, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS**;----------
- Article 13 paragraph (7), paragraph (8), and paragraph (12) regarding **THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING**;-----

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

- Article 14 paragraph (1) a) and b); paragraph (22); and paragraph (29) regarding **THE BOARD OF COMMISSIONERS;**----------
- Article 16 paragraph (2), paragraph (5), paragraph (6), and paragraph (10) regarding **THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING;**----------
- Article 17 paragraph (1) regarding **THE COMPANY WORK PLAN AND BUDGET;**----------
- Article 18 paragraph (2) and paragraph (8) regarding **FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT;** and----------
- Article 19 paragraph (3) regarding **REPORT;**----------

and to re-prepare the Articles of Association of the Company, so that the Articles of Association of the Company shall be further read as follows:----------

---------- **NAME AND DOMICILE** ----------

---------- **ARTICLE 1** ----------

(1) This Limited Liability Company shall bear the name **PT TIMAH Tbk**, hereinafter in these Articles of Association shall be simply called "**the Company**", domiciled and having its head office in Pangkalpinang City, Bangka Belitung.----------

(2) The Company may open branch office or representative office elsewhere, either inside or outside the territory of the Republic of Indonesia by obtaining prior approval from the Board of Commissioners

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

for Branch office or Representative office outside the Territory of the Republic of Indonesia.---------

---------- **TERM OF COMPANY INCORPORATION** ----------

---------- **ARTICLE 2** ----------

This Company has been incorporated since 02-08-1976 (the second day of August one thousand nine hundred and seventy six) and has obtained legal entity status since 05-02-1977 (the fifth day of February one thousand nine hundred and seventy seven) and shall be incorporated for indefinite term.

---- **PURPOSES AND OBJECTIVES, AND BUSINESS ACTIVITIES** ----

---------- **ARTICLE 3** ----------

(1) Purposes and objectives of the Company shall be to manage business in the fields of mining, industry, trade, transportation, and service relevant to mining business field and the Company's resources use optimization to produce high quality goods and / or services with strong competitiveness to obtain / gain profit in order to increase the Company value by applying the principles of the Limited Liability Company.--------

(2) To achieve the aforesaid purposes and objectives, the Company may conduct main business activities, as follows:----------

a. Tin Ore Mining (ISIC 07291);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. Other Excavated Material Mining not Containing Iron Ore (ISIC 07299);----------

c. Other Mining and Excavation, YTDL (ISIC 108999);

d. Basic Precious Metal Manufacturing Industry (ISIC 24201);----------

e. Non-Ferrous Basic Metal Manufacturing Industry (ISIC 124202);----------

f. Non-Ferrous Metal Milling Industry (ISIC 124203);----------

g. Metal and Metal Ore Wholesale Trade (ISIC 146620).----------

(3) In addition to main business activities as referred to in paragraph (2) hereof, the Company may conduct auxiliary / supporting business activities for the purpose of owned resources use optimization, including but not limited to:----------

a. Uranium and Thorium Ore Mining (ISIC 07210);--

b. Uranium and Uranium Ore Processing Industry (ISIC 24206);----------

c. Gold and Silver Mining (ISIC 07301);----------

d. Other Precious Metal Ore Mining (ISIC 07309);-

e. Quartz / Quartz Sand Excavation (ISIC 08995);-

f. Other Mining and Excavation Supporting Activities (ISIC 09900);----------

g. Dredging (ISIC 42914);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

h. Land Preparation (ISIC 43120);----------

i. Engineering and Technical Consulting Activities YBDI (ISIC 71102);----------

j. Head Office Activity (ISIC 70100);----------

k. Holding Company Activity (ISIC 64200);--------

1. Other Management Consulting Activities (ISIC 70209);----------

m. Laboratory Test Service (ISIC 71202);---------

n. Other Technical Analysis and Test (ISIC 71209);----------

---

o. Non-Fishing Port Building Construction (ISIC 42912);----------

p. Other Civil Building Constructions, YTDL (ISIC 142919);----------

q. Lodging Building Construction (ISIC 41017);---

r. Self-Owned or Rented Real Estate (ISIC 68111);----------

s. Motorized Transportation for Special Cargo (ISIC 49432);----------

t. Domestic Sea Transportation for Special Cargo (ISIC 50133);----------

u. Foreign Sea Transportation for Special Cargo (ISIC 50142);----------

v. Seaport Service Activity (ISIC 52221);----------

SIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

w. River and Lake Port Service Activities (ISIC 52222);----------

x. Other Water Transportation Support Activities (ISIC 52229);----------

y. Multi-mode Transportation (ISIC 52295);-------

z. Other Transportation Support Activities, YTDL (ISIC 52299);----------

aa. Rental and Lease Activities without Processing Industry Machinery and Equipment Option Rights (ISIC 77391);----------

bb. Rental and Lease Activities without Machinery, Equipment and Other Tangible Goods Option Rights, YTDL (ISIC 77399);----------

cc. Machinery, Mining, Excavation, and Construction Industries (ISIC 28240);---------

dd. Machinery Repairs for Special Needs (ISIC 33122);----------

ee. Industrial Estate (ISIC 68130);----------

ff. Warehousing and Storage (ISIC 52101);--------

gg. Other Warehousing and Storage (ISIC 52109);----------

hh. Hazardous Waste Collection (ISIC 38120);------

ii. Hazardous Waste Treatment and Disposal (ISIC 138220);----------

jj. Private-Managed Museum (ISIC 91022);----------

kk. Natural Tourism Park (ISIC 91034);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

11. Natural Adventure Tourism (ISIC 93223);-------

mm. Other Natural Tourism Attractions (ISIC 93229);----------

nn. Other Artificial / Human-Developed Tourism Attraction (ISIC 93239);----------

oo. Recreational Park (ISIC 93211);----------

pp. Conservation Park outside Natural Habitat (Ex-Situ) (ISIC 91031);----------

qq. Agro-tourism (ISIC 93231);----------

rr. Forest Area Use Service outside Forestry Sector (ISIC 02401);----------

ss. Other Short Term Accommodation Provision (ISIC -55199);----------

tt. Deer Nursery and Cultivation (ISIC 01494);----

uu. Mammal Captivity (ISIC 01722);----------

vv. Laying Hen Cultivation (ISIC 01462);----------

ww. Beef Cattle Nursery and Cultivation (ISIC 01411);----------

xx. Other Poultry Nursery and Cultivation (ISIC 01469);----------

yy. Leaf Vegetable Horticulture Farming (ISIC 01131);----------

zz. Fruit Horticulture Farming (ISIC 01132);-------

aaa. Fruit Vegetable Horticulture Farming (ISIC 01133);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

bbb. Tropical and Subtropical Fruit Farming (ISIC - 01220);----------

ccc. Freshwater Fish Enlargement in Fishpond (ISIC 03221);----------

ddd. Reptile Captivity (ISIC 01723);----------

eee. Other Plant / Wild Animal Captivity (ISIC 01729);----------

fff. Retail Trade for Handcrafts made of Wood, Bamboo, Rattan, Pandanus, Grass and their Kinds (ISIC 47781);----------

ggg. Retail Trade for Handcrafts made of Leather, Bone, Horn, Ivory, Fur and Preserved Animal (ISIC 47782);----------

hhh. Retail Trade for Handcrafts made of Metal (ISIC 47783);----------

iii. Retail Trade for Handcrafts made of Ceramic (ISIC 47784);----------

jjj. Retail Trade for Painting (ISIC 47785);--------

kkk. Retail Trade for Other Handcrafts and Painting (ISIC 47789);----------

lll. Retail Trade for Coffee, Granulated Sugar and Brown Sugar (ISIC 47243);----------

mmm. Retail Trade for Processed Meat and Fish (ISIC 47245);----------

nnn. Retail Trade for Other Foods (ISIC 47249);----------

ooo. Retail Trade for Textile (ISIC 47511);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

ppp. Retail Trade for Household Equipment made of Textile (ISIC 47512);----------

qqq. Retail Trade for Various Goods, prioritized on Food, Drink or Tobacco in Minimarket / Supermarket / Hypermarket (ISIC 47111);-------

rrr. Retail Trade for Various Goods, prioritized on Food, Drink or Tobacco not in Minimarket / Supermarket / Hypermarket (Traditional) (ISIC 47112);----------

sss. Retail Trade for Various Goods, prioritized on Non-Food, Non-Drink or Non-Tobacco in Department Store (ISIC 47191);----------

ttt. Restaurant (ISIC 56101);----------

uuu. Pub / Cafe (ISIC 56303);----------

vvv. Potash Mining (Potassium Carbonate) (ISIC 08915);----------

www. Mineral Mining, Chemicals and Other Fertilizing Materials (ISIC 08919);----------

xxx. Iron Sand Mining (ISIC 07101);----------

yyy. Iron Ore Mining (ISIC 07102);----------

zzz. Hazardous Waste Water Treatment and Disposal (ISIC 37022);----------

aaaa. Wholesale Trade for Secondhand and Scrap (ISIC 46696);----------

bbbb. Information Technology and Other Computer Service Activities (ISIC 62090);----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

cccc. Special Telecommunication Activity for Personal Needs (ISIC 61992);----------

dddd. Telecommunication Civil Building Construction for Transportation Infrastructures (ISIC 42205);----------

eeee. Telecommunication Installation (ISIC 43212);--

ffff. Field Facility (ISIC 93114);----------

gggg. Other Building Construction (ISIC 41019);-----

hhhh. Venue Rental for Holding of MICE Activity and Special Event (ISIC 68112).----------

---------- **CAPITAL** ----------

---------- **ARTICLE 4.** ----------

(1) The Company's Authorized Capital shall amount to Rp. 500,000,000,000.00 (five hundred billion Rupiah) divided into:----------

a. 1 (one) series-A Share *Dwiwarna*, and----------

b. 9,999,999,999 (nine billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) Series-B Shares;----------

in a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share.----------

(2) From the authorized capital, have been issued and subscribed for, and paid up, about 74.47% (seventy-four-point four seven percent) or 7,447,753,454 (seven billion four hundred and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

forty-seven million seven hundred and fifty-three thousand four hundred and fifty-four) shares in a nominal value of Rp. 372,387,672,700.00 (three hundred and seventy two billion three hundred and eighty seven million six hundred and seventy two thousand seven hundred Rupiah) comprised of:----------

a. 1 (one) Series-A Share *Dwiwarna* in a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah);----------

b. 7,447,753,453 (seven billion four hundred and forty-seven million seven hundred and fifty-three thousand four hundred and fifty-three) series-B shares in a nominal value of Rp. 372,387,672,650.00 (three hundred and seventy-two billion three hundred and eighty-seven million six hundred and seventy-two thousand six hundred and fifty Rupiah).---------

(3) 100% (one hundred percent) of the nominal value of each issued share as mentioned above, or totally amounting to Rp. 372,387,672,700.00 (three hundred and seventy-two billion three hundred and eighty-seven million six hundred and seventy-two thousand seven hundred Rupiah) have been subscribed for and paid up fully by each shareholder of the Company.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(4) By consistently observing any provisions of the prevailing laws and regulations, including Capital Market Regulation, share payment may be made in the form of money or in any other form. Share payment in any other forms other than money either in the form of tangible object or intangible object must fulfill the following provisions:----------

a. object to serve as capital payment must be announced to the public at the time of summons for General Meeting of Shareholders (hereinafter the General Meeting of Shareholders shall be abbreviated to the GMS) with respect to the payment;----------

b. object to serve as capital payment must be appraised by Appraiser registered with Financial Service Authority (hereinafter the Financial Service Authority shall be abbreviated to OJK) and shall not be collateralized in any manners;----------

c. must obtain approval from GMS under quorum as set forth in Article 25 paragraph (1) hereof;----------

d. in the event the object serving as capital payment is in the form of shares of the limited liability company making Public Offering or

ZAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the public company registered with Stock Exchange, then its price must be determined on the basis of reasonable market value; and----

e. in the event the payment originates from retained earnings, *agio* shares, the Company's net profit, and / or other equities, then the retained earnings, *agio* shares, the Company's net profit, and / or other equities shall have been included in the last Annual Financial Statement that has been audited by Accountant registered with the OJK, with an unqualified opinion.----------

(5) Shares in portfolio will be issued by the Board of Directors according to the Company capital needs anytime and under method and price, and conditions determined by the Board of Directors' Meeting upon approval of GMS, and in relation to price, GMS may delegate the authority of pricing to the Board of Commissioners in due observance of provisions set forth in these Articles of Association, and laws and regulations applicable in the field of Capital Market in Indonesia, provided that such shares shall not be sold below par value.----------

(6) Any increase of capital through the issuance of Equity Securities (Equity Securities are any

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Securities that can be exchanged with shares or Securities that give the rights to acquire shares from the Company as issuer), must be done under the following terms:----------

a. Any increase of capital through the issuance of Equity Securities made by order, then the same must be done by granting the Preemptive Rights (hereinafter called HMETD) to shareholders whose names are registered in the register of shareholders of the Company on date determined by a GMS which approves the issuance of Equity Securities, in an amount proportional to the quantity of shares registered in the register of shareholders of the Company in the name of respective shareholders, on that date, and the Company must announce information on capital increase plan by granting preemptive rights (HMETD) to the shareholder concerned by observing d of Capital Market;----------

b. Without prejudice to the effect of provisions applicable in the field of Capital Market, the issuance of Equity Securities without granting preemptive rights (HMETD) to shareholders may be made in the event the issuance of shares:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b.1. is aimed to the Company employee;---------

b.2. is aimed to the holder of bond or other Securities that can be converted into shares, issued upon approval of the GMS;----------

b.3. is made for the purpose of reorganization and / or restructuring that have been approved by the GMS; and / or----------

b.4. is aimed specially to the Republic of Indonesia as the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*.----------

c. Preemptive rights (HMETD) must be transferable and tradable within a term as set forth in laws and regulations, and provisions applicable in the field of Capital Market;----------

d. Equity Securities to be issued by the Company and not subscribed for by the holder of preemptive rights (HMETD) must be allocated to all shareholders who order additional Equity Securities, provided that if the quantity of Equity Securities ordered exceeds the quantity of Equity Securities to be issued, the Equity Securities not subscribed for must be allocated in proportion to the quantity of Preemptive Rights (HMETD) exercised

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

by each shareholder who orders the additional Equity Securities;----------

e. In the event there are still any remaining Equity Securities which are not subscribed for by shareholders as referred to in paragraph (6) d) hereof, then in the event that there is any standby buyer, the Equity Securities must be allocated to certain Party acting as standby buyer at same price and under same conditions;----------

f. Issuance of shares in portfolio to the holder of Securities that can be exchanged with the shares or Securities that give rights to acquire the shares may be executed by the Board of Directors based on the previous GMS of the Company that has approved the issuance of the Securities.----------

g. Addition of paid-up capital becomes effective after payment thereof has been made, and the issued shares shall have the same rights as shares of the same classification issued by the Company, without prejudice to the Company obligation to provide notification to the Minister of Laws and Human Rights (hereinafter the Minister of Laws and Human

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Rights shall be abbreviated to the Minister of Laws).----------

(7) Addition of the Company's authorized capital may be made only on the basis of the resolutions of the GMS. Amendment to the Articles of Association in order to change the authorized capital must be approved by the Minister of Laws, provided that:----------

a. Addition of authorized capital which results in the issued and paid-up capital being less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital, may be conducted as long as:----------

a.1. it has obtained approval from the GMS to increase the authorized capital;-------

a.2. it has obtained approval from the Minister of Laws;----------

a.3. the addition of issued and paid-up capital, so that it becomes at least 25% (twenty five percent) thereof, must be conducted within no later than 6 (six) months after approval from the Minister of Laws;----------

a.4. In the event the addition of paid-in capital as referred to in paragraph a.3 hereof is not fully fulfilled, the Company must re-amend these Articles of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Association, so that the issued and paid-up capital fulfill the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT), within a period of 2 (two) months after the period contemplated in a.3 hereof is not fulfilled;----------

a.5. Approval of the GMS as referred to in a.1 hereof includes approval to amend the Articles of Association as referred to in Article 4 paragraph (7) b) hereof.--

b. Amendment to the Articles of Association in order to increase the authorized capital becomes effective after the capital payment has occurred which results in the amount of paid-up capital being at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and having the same rights as other shares issued by the Company in due observance of the provisions of these Articles of Association, without prejudice the Company obligations to obtain approval for amendment to these Articles of Association from the Minister of Laws for the addition of the paid-up capital.----------

(8) Any addition of capital through the issuance of Equity Securities may deviate from the above

FIRDAUS OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

provisions, if the laws and regulations, particularly in the field of Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company shares are registered specify otherwise.----------

(9) GMS as referred to in this Article must be attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the resolutions of the GMS must be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*.------

---------- **SHARES** ----------

---------- **ARTICLE 5** ----------

(1) The Company shares shall be registered shares and shall be issued in the name of their owners registered in the Register of Shareholders comprised of:----------

- Series-A Shares *Dwiwarna*, that can be specially owned by the Republic of Indonesia only, and----
- Series-B Shares that may be owned by the Republic of Indonesia and / or the public.------

(2) In these Articles of Association, the meaning of "share" shall be any Series-A Share *Dwiwarna*, and Series-B Share, whereas the meaning of "shareholder" shall be the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the Shareholder of Series-B Share, unless expressly stated otherwise.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(3) The Company shall only recognize a person or a legal entity as a party authorized to exercise any Rights granted by laws over shares.----------

(4) a. Insofar as these Articles of Association do not specify otherwise, then the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the Shareholders of Series-B Shares shall have the same rights and 1 (one) share shall have 1 (one) voting right.----------

b. Pursuant to these Articles of Association, Series-A Shares *Dwiwarna* are the shares which grant special rights to their holders and shall be specially owned by the Republic of Indonesia only as the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*.----------

c. Special rights of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* shall be:----------

c.1. Rights to make approval in a GMS of the Company including the following rights:----------

c.1.1. Approval for the appointment and discharge of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;---

c.1.2. Approval for Amendment to these Articles of Association;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

c.1.3. Approval for change of shareholding structure;----------

c.1.4. Approval relevant to merger, amalgamation, separation and dissolution, and takeover of other company;----------

c.2. Rights to nominate Candidate for the Members of the Board of Directors and Candidate for the Members of the Board of Commissioners of the Company;----------

c.3. Rights to propose the agenda of the GMS;----------

c.4. Rights to ask for and access any data and the Company document;----------

c.5. Rights to decide guideline / strategic policy to the Company in the following fields:----------

c.5.1. Accounting and finance;----------

c.5.2. Development and Investment;--------

c.5.3. Operation and quality control;-----

c.5.4. Marketing and commerce;----------

c.5.5. Information Technology;----------

c.5.6. Procurement and logistics;---------

c.5.7. Human resources;----------

c.5.8. Governance, risk management and internal supervision;----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

c.5.9. Law, compliance and legal issue dealing;----------

c.5.10. Job health and safety, environmental management and social responsibilities;----------

c.5.11. technology-related research and innovation and Intellectual Property Rights (IPR);----------

c.5.12. Studies on laws and regulations, policy; and / or----------

c.5.13. Other fields.----------

c.6. Rights to make inspection / review, give input, ask for information, provide approval, make decision and monitoring on the execution of Management Contract of the Company Board of Directors, including to determine key performance indicator attached therein, as requirements for appointment of the members of the Board of Directors of the Company;----------

c.7. Rights to propose amendment to the Articles of Association of the Company;---

c.8. Rights to coordinate, hold and / or synergize function for the Company based on agreement with / powers from

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

the Company in any fields as referred to in c.5 hereof;----------

c.9. Rights to make the synergy of supervision to operational activity or the Company strategy;----------

c.10. Rights to make control or monitoring to the activity execution or strategic policy and operation of the Company;------

c.11. Rights to make examination / review, give input, ask for information, and approve the Company Long-Term Plan, the Company Work Plan and Budget, any other work plan, along with an amendment thereto submitted by the Board of Commissioners of the Company; and---------

c.12. Any other rights set forth in these Articles of Association as the rights and / or authorities of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*;----------

with the mechanism of right use pursuant to the provisions of these Articles of Association and / or laws and regulations.----------

d. Except special rights as referred to in paragraph (4) c) hereof and in any other parts of these Articles of Association, the Shareholders of Series-B Shares shall

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

have the same rights pursuant to the prevailing laws and regulations.----------

e. Exercise of special rights of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* as referred to in c) hereof may be empowered to the Shareholder of Series-B Shares with the Company majority shareholding (hereinafter referred to as **the Majority Shareholder of Series-B Shares**), except the exercise of special rights referred to in c.1.3 and c.1.4 hereof.----------

(5) If a share is transferred and due to any reason belongs to more than 1 (one) person, then ones who own collectively shall be obliged to appoint one of them and one so appointed shall be registered as their collective representative in the Register of Shareholders, entitled to use any rights granted by laws to the share.--------

(6) In the event those collectively own the share fail to notify in writing the Company of the appointment of the collective representative, then the Company shall treat the shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company as the sole valid shareholder of the share(s).----------

FIKRI SAIFUDDIN
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(7) Any Shareholder must pursuant to laws be subject to these Articles of Association and any resolutions adopted lawfully in a GMS and any laws and regulations.----------

(8) To all shares of the Company registered in Stock Exchange shall apply any laws and regulations in the field of Capital Market and regulation regarding Stock Exchange where the Company shares are registered.----------

---------- **SHARE CERTIFICATE** ----------

---------- **ARTICLE 6** ----------

(1) Proof of Share Ownership shall be as follows:-------

a. In the event the Company Shares are not included in Collective Custody with the Settlement and Depository Institution, then the Company shall be obliged to provide the proof of share ownership in the form of share certificate or collective share certificate to shareholder concerned.----------

b. In the event the Company Shares are included in Collective Custody with the Settlement and Depository Institution, then the Company shall be obliged to issue certificate or written confirmation to the Settlement and Depository Institution as a proof of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

registration in the register book of shareholders of the Company.----------

(2) The Company shall issue share certificate in the name of its owner registered in the Register of Shareholders of the Company pursuant to laws and regulations in the field of Capital Market and any rules applicable in Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

(3) The Company may issue a collective share certificate that proves the ownership of 2 (two) or more shares owned by a Shareholder.----------

(4) Share certificate must at least state:----------

a. Name and address of shareholder;----------

b. Serial number of the share certificate;---------

c. Date of issuance of the share certificate;------

d. Nominal value of share;----------

(5) Collective share certificate must at least state:---

a. Name and address of Shareholder;----------

b. Serial number of the collective share certificate;----------

c. Date of issuance of the collective share certificate;----------

d. Nominal value of share and collective value of shares;----------

e. Quantity of shares and serial number of the share certificate;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(6) Any share certificate, collective share certificate, convertible bond, warrant, and / or any other securities which can be converted into share must bear the signature of President Director together with President Commissioner, or if the President Commissioner is unavailable without requiring proof to any third party, then by the President Director together with a member of the Board of Commissioners, or if the President Director and the President Commissioner are unavailable not requiring proof to any third party, then by a Director together with a member of the Board of Commissioners, and the signature may be printed directly on the share certificate, collective share certificate, convertible bond, warrant, or any other securities which can be converted into share in due observance of laws and regulations in the field of Capital Market, and any regulations regarding Stock Exchange where the company shares are registered.---

(7) In the event the Company doesn't issue share certificate, share ownership may be proved by share ownership statement issued by the Company.----

(8) All share certificates and / or collective share certificates issued by the Company may be collateralized by following the provisions of

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

laws and regulations in the field of Capital Market and UUPT (Limited Liability Company Law).----

---------- **DUPLICATE SHARE CERTIFICATE** ----------

---------- **ARTICLE 7** ----------

(1) In the event share certificate is damaged, duplication of the share certificate may be made if:----------

a. party who submits written request for duplication is the owner of the share certificate;----------

b. the Company has received the damaged share certificate.----------

c. Original of the damaged share certificate has been returned and exchanged with new share certificate under same serial number as that of the original share certificate; and----------

d. The Company shall be obliged to destroy the original of the damaged share certificate after providing duplicate share certificate.----

(2) In the event share certificate is lost, the duplication of the share certificate may be made if:----------

a. Party who submits request for the duplication is the owner of the share certificate;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

b. The Company has obtained a reporting document from the Police of the Republic of Indonesia regarding the loss of the share certificate;----

c. Party who submits request for the duplication provides guarantee deemed necessary by the Board of Directors of the Company; and----------

d. Plan to issue duplicate for lost share certificates has been announced at the Stock Exchange where the Company shares are registered within no later than 14 (fourteen) days before the issuance of the duplicate share certificates.----------

(3) After the duplicate share certificate has been issued, then the original share certificate shall be no longer applicable for the Company.----------

(4) Any expenses for the issuance of the duplicate share certificate shall be borne by the shareholder concerned.----------

(5) The above provisions regarding the issuance of the duplicate share certificate shall also apply to the issuance of the duplicate collective share certificate or the Equity Securities.---------

---------- **COLLECTIVE CUSTODY** ----------

---------- **ARTICLE 8** ----------

(1) To any shares in Collective Custody shall apply the following provisions:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. shares in Collective Custody with the Depository and Settlement Institution must be recorded in the Register Book of the Company Shareholders in the name of the Depository and Settlement Institution;----------

b. shares in Collective Custody with the Custodian Bank or the Securities Company recorded in securities account with the Depository and Settlement Institution shall be recorded in the name of the Custodian Bank or the Securities Company for the benefit of account holder with the Custodian Bank or the Securities Company;----------

c. If shares in Collective Custody with the Custodian Bank are the parts of Mutual Fund securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody with the Depository and Settlement Institution, then the Company will record the shares in the Register Book of the Company Shareholders in the name of the Custodian Bank for the benefit of Investment Unit Holder of the Mutual Fund in the form of collective investment contract;----------

d. The Company shall be obliged to issue certificate or written confirmation to the

FIKRI SAID SUED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Depository and Settlement Institution as referred to in a) hereof or to the Custodian Bank as referred to in c) hereof as a proof of recordation in the Register Book of the Company Shareholders;----------

e. The Company shall be obliged to mutate shares in Collective Custody registered in the name of the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Register Book of the Company Shareholders into those in the name of a party appointed by the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank.----------

f. Request for mutation shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank to the Company or Securities Administration Bureau appointed by the Company.-

g. The Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company shall be obliged to issue written confirmation to account holder as a proof of recordation in the securities account.----------

h. In Collective Custody, each share of the same type and classification issued by the

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Company shall be equivalent and may be exchanged one to another.----------

i. The Company shall be obliged to reject the recordation of share into Collective Custody if the share certificate is lost or destroyed, except that a party requesting the mutation can submit sufficient proof and guarantee that the party concerned is truly a lawful owner of the lost or destroyed share and the share certificate is truly lost and destroyed.----------

j. The Company shall be obliged to reject the recordation of share into Collective Custody if the share is collateralized, put in confiscation by virtue of the Court judgment or confiscated for examination of criminal case.----------

k. Securities account holders whose Securities are recorded in Collective Custody shall be entitled to be present and / or cast votes in a GMS according to the quantity of shares they own in the securities account.----------

l. Bank Custodian and Securities Company shall be obliged to submit the register of Securities accounts along with the quantity of the Company shares owned by the respective holders

FIKRI SAID OKED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of account in the Custodian Bank and the Securities Company to the Depository and Settlement Institution for further submission to the Company within no later than 1 (one) working day before the date of Summons for the GMS.----------

m. Investment Manager shall be entitled to be present and cast a vote in a GMS for the Company shares included in Collective Custody with the Custodian Bank being parts of Mutual Fund securities portfolio in the form of Collective Investment Contract and not included in Collective Custody with the Depository and Settlement Institution, provided that the Custodian Bank shall be obliged to inform on the name of the Investment Manager within no later than 1 (one) working day before the date of summons for the GMS.-----

n. The Company shall be obliged to distribute dividends, bonus shares or any other rights in relation to share ownership to the Depository and Settlement Institution for any shares in Collective Custody with the Depository and Settlement Institution and subsequently the Depository and Settlement Institution shall distribute dividends, bonus shares or any

ELKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

other rights to the Custodian Bank and to the Securities Company for the benefit of respective holders of account in the Custodian Bank and the Securities Company.----------

o. The Company shall be obliged to distribute dividends, bonus shares or any other rights in relation to share ownership to the Custodian Bank for any shares in Collective Custody with the Custodian Bank being parts of Mutual Fund securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody with the Depository and Settlement Institution.------

p. Timeframe of appointment of securities account holders entitled to receive dividends, bonus shares or any other rights in relation to share ownership in Collective Custody shall be determined by the GMS, provided that the Custodian Bank and the Securities Company are obliged to submit the register of security account holders along with the quantity of the Company shares owned by the respective securities account holders to the Depository and Settlement Institution at the latest on date being the basis of appointment of shareholders entitled to receive the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. inggris - B. inggris ke B. Indonesia

dividends, bonus shares or any other rights to be further submitted to the Company within no later than 1 (one) working day after a date being the basis of appointment of shareholders entitled to obtain the dividends, bonus shares or any other rights.----------

(2) Provisions regarding Collective Custody shall be subject to the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market and the rules of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

------ **REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER** -----

---------- **ARTICLE 9** ----------

(1) Board of Directors shall maintain and keep the Register of Shareholders and Special Register, and make them available at the Company domicile.----

(2) Register of Shareholders shall at least state:------

a. Name and address of the Shareholders;----------

b. Quantity, serial number, and date of acquisition of shares owned by the Shareholders;----------

c. Amount paid up for each share;----------

d. name and address of individual person or legal entity having lien over shares or acting as share fiduciary guarantee recipient and the date of acquisition of the lien or the date of registration of the fiduciary guarantee.

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. inggris - B. inggris ke B. Indonesia

e. Information on share payment in any other forms other than money; and----------

f. Any other information deemed necessary by the Board of Directors.----------

(3) Special Register shall state any information on share ownership and / or the change of share ownership by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners along with their family members in the Company and / or in any other company and date on which the shares were acquired.----------

(4) Shareholders must notify the Board of Directors of any move of their residence by mail with receipt. Insofar as such notification is not yet made, then any summons and notification to the Shareholders shall be valid if submitted to the Shareholder's address most recent recorded in the Register of Shareholders.----------

(5) Board of Directors shall be obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register as well as possible.----------

(6) Each Shareholder shall be entitled to have access to the Register of Shareholders and the Special Register at the Company Office or at the Securities Administration Bureau appointed by the Company within working hours.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(7) Board of Directors of the Company may appoint and authorize the Securities Administration Bureau to make share recordation in the Register of Shareholders and the Special Register. Any registration or recordation in the Register of Shareholders including the recordation of sale, transfer, collateralization, mortgage or fiduciary guarantee, related to the Company shares or rights or interest over the shares must be done pursuant to these Articles of Association and any laws and regulations in the field of Capital Market.----------

(8) Provisions of this Article shall be applicable insofar they are not set forth otherwise in any laws and regulations in the field of Capital Market and rules regarding Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

(9) In case of sale, transfer, collateralization in the form of pledge, fiduciary guarantee, or those relevant to the Company shares or *cessie* with respect to any rights and interests over the shares, then any party concerned shall report thereon in writing to the Board of Directors or party appointed by the Board of Directors for registration and listing in the Register of Shareholders, pursuant to these Articles

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of Association in due observance of any laws and regulations in the field Capital Market and rules regarding Stock Exchange in Indonesia where the Company shares are listed.----------

---------- **TRANSFER OF RIGHTS OVER SHARES** ----------

---------- **ARTICLE 10** ----------

(1) In case of any change of ownership of a share, the original owner thereof registered in the Register of Shareholders shall be consistently deemed to be the owner of the share until new owner of the share has been recorded in the Register of Shareholders, in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market and rules regarding Stock Exchange where the Company share is listed.----------

(2) a. Unless set forth otherwise in laws and regulations, particularly rules in the field of Capital Market and these Articles of Association, any transfer of rights over shares must be proved by a document signed by or on behalf of transferor and by or on behalf of transferee of the relevant shares. Document on the transfer of rights over shares must be in the form of that determined or approved by the Board of Directors.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. Any Transfer of Rights over shares included in Collective Custody shall be made by book transfer from one Securities Account to another Securities Account in the Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank and the Securities Company. Document on the transfer of rights over shares must be in the form of that determined and / or acceptable by the Board of Directors, provided that document on the transfer of rights over shares listed in the Stock Exchange must fulfill any regulations applicable in the Stock Exchange where the shares are listed, without prejudice to any laws and regulations and rules applicable at place where the Company shares are recorded.----

(3) Board of Directors may reject by giving any reason thereof, to register the transfer of rights over shares in the Register of Shareholders of the Company, if any methods required in the provisions of these Articles of Association is not complied with or if one of requirements for permit granted to the Company or any other matters required by the authority is not fulfilled.-

(4) If the Board of Directors reject to register the transfer of rights over shares, then the Board of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Directors shall be obliged to send the notification of rejection to a party intending to transfer his rights within no later than 30 (thirty) calendar days after request for registration has been received by the Board of Directors in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market and rules regarding Stock Exchange where the Company shares are listed.-

(5) Regarding the Company shares listed in the Stock Exchange where the Company shares are recorded, any rejection to register the transfer of rights over the shares must conform to rules regarding the Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

(6) Any person obtaining rights over shares by reason of death of a shareholder or due to any other reason causing the ownership of the shares is transferred under the law may submit any proofs of his rights as required by the Board of Directors, by submitting written request for registration as shareholder of the aforesaid shares. Registration may be made only if the Board of Directors can well accept on the basis of the proofs of the rights and without prejudice to the provisions of these Articles of Association.-

FIKRI SUBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(7) Any restrictions, prohibitions and provisions of the Articles of Association which stipulate any rights to transfer the rights over shares and registration for the transfer of rights over the shares must be subject to rules regarding Capital Market.----------

(8) Any Shareholder who makes request for the holding of a GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) a) iii hereof shall not transfer his share ownership within 6 (six) months from the GMS if request for holding of the GMS is approved by the Board of Directors or the Board of Commissioners or judged by court.----------

(9) Form and procedures of the transfer of rights over shares in trading at the Stock Exchange must fulfill any laws and regulations in the field of Capital Market and any rules regarding the Stock Exchange where the Company shares are listed, except for any rights over Series-A Shares *Dwiwarna* that can not be transferred to anyone.----------

---------- **BOARD OF DIRECTORS** ----------

---------- **ARTICLE 11** ----------

(1) Company shall be managed and led by the Board of Directors which number is adjusted to the Company needs, at least comprised of 2 (two)

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

members of the Board of Directors who one of them shall be appointed as President Director.------

(2) Members of the Board of Directors must follow the following terms:----------

a. UUPT (Limited Liability Company Law);----------

b. laws and regulations in the field of Capital Market; and----------

c. any other laws and regulations applicable to the Company and any other laws and regulations relevant to the Company business activities.----

(3) One eligible to be appointed as a member of the Board of Directors shall be an individual person who meets any requirements when appointed and during his term of office:----------

a. shall have good character, moral and integrity;-

b. shall be competent in taking any legal actions;-

c. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:----------

1) shall never be declared insolvent;----------

2) shall never become a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners declared guilty for causing insolvency of a company;----------

3) shall never be punished for committing criminal action that harms the state finance and / or relevant to financial sector;------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke Indonesia

4) shall never become a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during his term of office:----------

a) ever fails to hold an annual GMS;--------

b) is ever rejected by the GMS with respect to his accountability as a member of the Board of Directors and / or as a member of the Board of Commissioners or ever fails to provide accountability as a member of the Board of Directors and / or as a member of the Board of Commissioners to the GMS; and----------

c) ever makes a company which obtain permit, approval, or registration from OJK (the Financial Service Authority) unable to fulfill its obligations to submit annual report and / or financial statement to OJK.----------

d. shall be committed to comply with any laws and regulations, and shall be subject to any provisions set forth in Management Contract signed by the Board of Directors of the Company, the Board of Commissioners of the Company and the representative of the Shareholder of Series-B Share *Dwiwarna*;---------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

e. shall have knowledge and / or expertise in a field required by the Company; and----------

f. shall fulfill any other requirements as set forth in paragraph (2) hereof.----------

(4) Fulfillment of requirements as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) hereof must be included in a written statement signed by the prospective member of the Board of Directors and the written statement shall be submitted to the Company. The written statement must be examined and documented by the Company.----------

(5) The Company shall be obliged to hold a GMS to make substitution of any member of the Board of Directors not fulfilling the requirements.-------

(6) Appointment of the member of the Board of Directors not fulfilling the requirements as referred to in paragraph (2) hereof shall be null and void since any other member of the Board of Directors or the Board of Commissioners found the same on the basis of on valid proof, and the member of the Board of Directors concerned shall be notified in writing thereof in due observance of the prevailing laws and regulations.--

(7) Within no later than 2 (two) working days from finding of appointment of the member of the Board of Directors not fulfilling the requirements,

ERKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

any other member of the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce the cancellation of appointment of the member of the Board of Directors concerned in publication by observing any regulations in the field of Capital Market, and within no later than 7 (seven) days from finding that the appointment of the member of the Board of Directors fails to fulfill the requirements, shall notify the Minister in charge of laws thereof for recordation pursuant to laws and regulations.----------

(8) Legal Actions which have been taken for and on behalf of the Company by the member of the Board of Directors not fulfilling the requirements before the cancellation of appointment of the member of the Board of Directors shall remain binding and shall be the responsibilities of the Company.----------

(9) Legal Actions which have been taken for and on behalf of the Company by the member of the Board of Directors not fulfilling the requirements after the cancellation of appointment thereof as referred to in paragraph (6) hereof shall be invalid and shall be the personal responsibilities of the member of the Board of Directors concerned.----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(10) Any Members of the Board of Directors shall be appointed and discharged by a GMS attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the Resolutions of the GMS must be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* in due observance of the provisions of these Articles of Association.----------

This provision shall apply also to a GMS held in order to revoke and confirm the decision of suspension of the members of the Board of Directors.----------

(11) Resolutions of a GMS regarding the appointment and discharge of the member of the Board of Directors also specify the commencement of validity of the appointment and discharge. In the event the GMS fails to specify the same then the appointment and discharge of the member of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.----------

(12) a. Any members of the Board of Directors shall be appointed for a timeframe from the closing of, or as of the date appointed by, a GMS which makes appointment thereof and shall end on the closing of the 5th (Fifth) Annual GMS after the date of their appointment, provided that the timeframe shall not exceed

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

5 (five) years, in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market, without prejudice to the rights of the GMS to anytime discharge the members of the Board of Directors before expiration of their term of office.----------

b. Such discharge shall take effect from the closing of the GMS, unless specified otherwise by the GMS.----------

c. After expiration of their term of office, the members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for one term of office.--

(13) GMS may discharge a member of the Board of Directors anytime by stating any reasons thereof.---

(14) Reasons for discharge of the member of the Board of Directors as referred to in paragraph (13) hereof shall arise if based on facts the member of the Board of Directors concerned:----------

a. is unable / less able to fulfill his obligations that have been agreed upon in the management contract of the Board of Directors as referred to in Article 11 paragraph 3 d) hereof;----------

b. is unable to perform his duties properly;-------

c. violates the provisions of these Articles of Association and / or any laws and regulations;--

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke Indonesia

d. is involved in any action that harms the Company and / or state;----------

e. commits action that infringes ethics and / or propriety which should be honored as a member of the Board of Directors;----------

f. is declared guilty by virtue of the Court judgment having a permanent force of laws;------

g. resigns; and / or----------

h. shows any other reasons deemed correct by a GMS to be discharged for the Company interest and objectives.----------

(15) Decision for discharge due to any reasons as referred to in paragraph (14) hereof shall be made after the member of the Board of Directors concerned has been given the opportunity to defend himself, except for paragraph (14) f) and g) hereof.----------

(16) Discharge for reasons as referred to in paragraph (14) d) and f) hereof constitutes dishonorable discharge.----------

(17) Among the members of the Board of Directors and between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners shall have no blood family relationship until the third generation, either based on vertical line or horizontal line or in-law family

FIKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

relationship / family relationship arising from marriage, including child-in-law or brother-in-law (sister-in-law).----------

(18) In the event condition as referred to in paragraph (17) hereof occurs, then a GMS shall be authorized to discharge one of them.----------

(19) Members of the Board of Directors may be given salaries along with any other facilities and / or benefits including *tantiem* and retirement compensation with type and in amount determined by a GMS, and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioners.---------

(20) If at any time for any reasons, one or more positions of the members of the Board of Directors are vacant:----------

a. Board of Commissioners shall appoint one other member of the Board of Directors to perform the duties of the member of the Board of Directors so vacant with same powers and authorities.----------

b. In due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, and policies, a GMS must be held to fill such vacancy if the vacancy makes the members of the Board of Directors less than 2 (two) persons, one of which is President Director or such

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

vacant position is President Director or other director required by the provision of the prevailing laws and regulations, and policies.----------

c. GMS as referred to in b) hereof shall be held within no later than 90 (ninety) days after the vacancy as referred to in b) hereof.--

(21) In case of vacancy of a position in the Board of Directors due to the expired position of a member of the Board of Directors and a GMS has not yet appointed substitute thereof, then the member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed by a GMS to perform his duties as a member of the Board of Directors with same powers and authorities, provided that the member of the Board of Directors whose term of office has expired has just completed 1 (one) period of term of office.----------

(22) a. If at any time due to any reasons, all positions in the Board of Directors of the Company are vacant then within no later than 90 (ninety) days after such vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy of position in the Board of Directors.----------

b. During the position is vacant and the GMS has not yet filled the vacant position in

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

the Board of Directors as referred to in a) hereof, then the Company shall be managed temporarily by the Board of Commissioners with same powers and authorities.----------

(23) a. A member of the Board of Directors may resign from his position before expiration of his term of office. In the event there is any member of the Board of Directors who intends to resign, then the member of the Board of Directors concerned shall be obliged to submit request for resignation in writing to the Company.----------

b. The Company shall be obliged to hold a GMS to decide the request for resignation of the member of the Board of Directors within no later than 90 (ninety) days after receipt of request letter for the resignation.----------

c. The Company shall be obliged to make information disclosure to the public and shall submit to OJK (the Financial Service Authority) within no later than 2 (two) working days after:-------

i. receipt of request for resignation of the member of the Board of Directors as referred to in a) hereof; and----------

ii. results of the GMS as referred to in b) hereof.----------

IKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

d. Before effect of the resignation, the member of the Board of Directors concerned shall remain obliged to complete his duties and responsibilities pursuant to these Articles of Association and the laws and regulations.----

e. Accountability as a member of the Board of Directors from his appointment until the date of approval for his resignation in the GMS may remain possible to the resigning member of the Board of Directors as mentioned above.----------

f. A resigning member of the Board of Directors will be free of responsibilities immediately after obtaining the discharge and acquittal of responsibilities from an Annual GMS.---------

g. In the event the resignation of the member of the Board of Directors makes the number of the members of the Board of Directors less than 2 (two) persons, then the resignation shall be valid if has been decided by a GMS and new member of the Board of Directors has been appointed so that the minimum requirement for the number of the members of the Board of Directors has been fulfilled.------

(24) Position as a member of the Board of Directors shall end in case of:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

a. his resignation having taken effect, as referred to in paragraph (23) b) hereof;--------

b. death;----------

c. expiration of his term of office;----------

d. discharge by virtue of the resolutions of the GMS;----------

e. insolvency declared by the Commercial Tribunal having a permanent force of laws or being put under guardianship by virtue of court judgment; or----------

f. failure to fulfill any requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and any laws and regulations.----------

(25) Provision as referred to in paragraph (24) f) including but not limited to double position shall be prohibited.----------

(26) Member of the Board of Directors who quits before or after his expired term of office, except for quit due to death, then the person concerned must convey accountability for his actions which accountability has not yet been accepted by a GMS.----------

(27) Members of the Board of Directors may be anytime suspended by the Board of Commissioners by stating any reasons thereof if they act contrarily

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

to these Articles of Association or there is any indication to take any action that harms the Company or neglect their obligations or there is any urgent reason to the Company, in due observance of the following provisions:----------

a. Such suspension must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned along with any reasons that result in the suspension with copy to be sent to the Board of Directors.----------

b. Notification as referred to in a) hereof shall be submitted within no later than 2 (two) working days after the decision of the suspension.----------

c. Member of the Board of Directors so suspended shall have no authority to manage the Company for the benefit of the Company according to the purposes and objectives of the Company or represent the Company either inside or outside the court.----------

d. Within no later than 90 (ninety) days after the suspension the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or confirm the decision of the suspension.----------

e. In case of the elapse of timeframe to hold the GMS as referred to in d) hereof or if

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

the GMS fails to make decision, then the suspension will be null and void.----------

f. Limitation of authority referred to in c) hereof shall be applicable from the decision of the suspension by the Board of Commissioners until:----------

1) there is any resolutions of the GMS that confirm or cancel the suspension as referred to in d) hereof; or----------

2) elapse of the timeframe as referred to in d) hereof.----------

g. At the GMS as referred to in d) hereof, the member of the Board of Directors concerned shall be given the opportunity to defend himself.----------

h. Suspension can neither be extended nor re-decided for same reason, if the suspension is declared null and void as referred to in e) hereof.----------

i. If a GMS cancels the suspension or condition as referred to in e) hereof occurs, then the member of the Board of Directors concerned must perform his duties back accordingly.-------

j. In the event a GMS confirms the decision of the suspension, then the member of the Board

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of Directors concerned shall be discharged permanently.----------

k. If the member of the Board of Directors so suspended is not present in the GMS after being summoned in writing, then the member of the Board of Directors so suspended shall be deemed to have not exercised his right to defend himself at the GMS and have accepted the resolutions of the GMS.----------

l. The Company shall be obliged to make information disclosure to the public and shall submit to OJK (the Financial Service Authority) with respect to:----------

1) the decision of the suspension; and---------

2) results of the GMS to revoke or confirm the decision of the suspension as referred to in d) hereof, or information on the cancellation of the suspension by the Board of Commissioners due to failure to hold the GMS until the elapse of timeframe as referred to in e) hereof, within no later than 2 (two) working days after such occurrence.----------

(28) Members of the Board of Directors shall be prohibited from holding double position as:---------

PIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

a. Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprise, Region-Owned Enterprise, Private-Owned Enterprise;----------

b. member of the Board of Commissioners and / or the Board of Supervisors of State-Owned Enterprise;----------

c. other structural and functional positions in central and / or regional government agency / institution;

d. political party administrator, member of DPR (Legislative Assembly), DPD (Regional Representative Council), DPRD (Regional People's Representative Assembly) at provincial level, and DPRD at regency / city level and / or Regional Head / Regional Head Deputy;----------

e. candidate for member of DPR (Legislative Assembly), DPD (Regional Representative Council), DPRD (Regional People's Representative Assembly) at provincial level, and DPRD at regency / city level and / or Regional Head / Regional Head Deputy;----------

f. any other positions which may cause the conflict of interest; and / or----------

g. any other positions pursuant to the provisions of the laws and regulations.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(29) In case of double position of the Board of Directors not included in the provisions of paragraph (28) hereof, approval from the Board of Commissioners' Meeting shall be required.--------

---- **DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD** ----

---------- **OF DIRECTORS** ----------

---------- **ARTICLE 12** ----------

(1) Board of Directors shall have duties to take any relevant actions and shall be responsible for management of the Company in the interest of the Company according to the purposes and objectives of the Company, by consistently observing and being subject to the provisions of these Articles of Association, and representing the Company either inside or outside the Court, on any matters and any events with limitation as set forth in the laws and regulations, these Articles of Association and / or the Resolutions of the GMS.----------

(2) In performing any duties as referred to in paragraph (1) hereof, then:----------

a. The Board of Directors shall have the rights and authorities, as follows:----------

1) To make policy deemed correct in the Company management;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

2) To arrange the transfer of powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court, to a person or several persons specially appointed therefor, including the Company workers, either individually or collectively and / or any other agency;----------

3) To set forth provisions regarding the Company workers, including decision on wage, retirement or old age security insurance and any other incomes of the Company workers pursuant to the prevailing laws and regulations;----------

4) To appoint and discharge the Company workers pursuant to the Company Regulation regarding manpower and any prevailing laws and regulations;----------

5) To appoint and discharge the Company Secretary and / or the Head of Internal Supervisory Unit upon approval of the Board of Commissioners;----------

6) To write-off uncollectible receivables pursuant to provisions set forth in these Articles of Association and further reported to the Board of Commissioners and

FIFRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

subsequently reported and accountable for, in Annual Report;----------

7) Not to collect more interest receivables, fines, fees and other receivables other than principal, for the purpose of restructuring and / or settlement of receivables and any other actions for the purpose of settlement of the Company receivables with obligations to report thereon to the Board of Commissioners which provision and procedures of reporting will be determined by the Board of Commissioners;----------

8) To take any actions and do other thing with respect to management or ownership of the Company assets, bind the Company with other party and / or other party with the Company, and represent the Company inside and outside the court, on any matters and any events, with limitations as set forth in laws and regulations, the Articles of Association and / or the Resolutions of the GMS.----------

b. Board of Directors shall have obligations:------

1) To make efforts for, and guarantee, the operation of the Company business and

FIRMANSAH OBED PENERJEMAH TERSUMPAH B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

activity according to the purposes and objectives, and business activity;----------

2) To prepare on right time the Company Long Term Plan, the Company Work Plan and Annual Budget and any other work plan, and their modification to be submitted to the Board of Commissioners and to obtain approval from the Board of Commissioners. Board of Directors' Approval related to this paragraph may be decided after obtaining approval from the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* or its proxy;----------

3) To Prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, and Minutes of the Board of Directors' Meeting;----------

4) To prepare Annual Report, among others, containing Financial Statement, as the form of accountability of the Company management and the Company's financial document as referred to in Law regarding the Company Document.----------

5) To prepare Financial Statement referred to in 4) hereof on the basis of the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Financial Accounting Standard and submit the same to Public Accountant for audit.--------

6) To submit Annual Report after being reviewed by the Board of Directors within no later than 5 (five) months after the expiration of the Company's fiscal year, to the Shareholders for approval and validation in a GMS.----------

7) To give explanation at the GMS with respect to Annual Report;----------

8) To submit Balance Sheet and Profit and Loss Statement which have been validated by the GMS, to Minister in charge of laws pursuant to laws and regulations;----------

9) To prepare other report as required by the provisions of laws and regulations, including but not limited to quarterly report with respect to the implementation of Social and Environmental Responsibility Program;----------

10) To maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Board of Directors' Meeting, the Company's Annual Report and Financial Document as referred

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

to in 4) and 5) hereof, and any other documents of the Company;----------

11) To keep at the Company domicile: the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Board of Directors' Meeting, the Company's Annual Report and Financial Document, and any other documents of the Company;----------

12) To prepare and maintain bookkeeping and administration of the Company according to prevalence applicable for a Company;-----

13) To prepare accounting system according to Financial Accounting Standard and based on the principles of internal control, particularly any functions of management, recordation, and supervision;----------

14) To provide periodic report under method and time pursuant to applicable provisions, and any other reports anytime requested by the Board of Commissioners and / or the shareholder of Series-A Shares *Dwiwarna*, in due observance of the laws and regulations, specially any applicable regulations in the field of Capital Market;-

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

15) To prepare the composition of the Company organization completely with details and duties;----------

16) To give explanation regarding any matters questioned or requested by the members of the Board of Commissioners and / or requested by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* (carried out through or coordinated by the proxy of the Shareholder of Series-A *Dwiwarna*), in due observance of laws and regulations specially the prevailing regulation in the field of Capital Market;----------

17) To perform any other obligations pursuant to provisions set forth in these Articles of Association and defined by the GMS;------

18) To fulfill any requirements and take any actions in order to meet any rights of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* as referred to in Article 5 paragraph 4 c) of these Articles of Association.------

(3) In performing their duties, the Board of Directors shall be obliged to pour out their energy, thought, attention and devotion fully on duties, obligations and achievement for the Company goals.--

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(4) In performing their duties, the members of the Board of Directors must comply with these Articles of Association and any laws and regulations, and shall be obliged to execute the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and reasonability.----------

(5) Each member of the Board of Directors shall be obliged to implement his duties and responsibilities as referred to in paragraph (1) hereof in good faith, with full of responsibility and caution, for the benefit and business of the Company in due observance of the prevailing laws.----------

(6) a. Each member of the Board of Directors shall be responsible individually and collectively for the Company loss caused by mistake or negligence of the member of the Board of Directors in performing his duties.----------

b. Members of the Board of Directors shall not be accountable for the Company loss as referred to in a) hereof, if they can prove that:----------

1) the loss is not their mistake or negligence;

2) they have worked in good faith, with full of responsibility and caution, for

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

the benefit of, and according to the purposes and objectives of, the Company;----

3) they have no conflict of interest, either directly or indirectly for any actions of management that cause loss; and----------

4) they have taken any actions to prevent the occurrence or continuance of the loss.--

(7) i. Any actions of the Board of Directors below must obtain written approval from the Board of Commissioners:----------

a) To dispose of / transfer and / or mortgage the Company assets with value exceeding certain amount specified by the Board of Commissioners, except for any assets recorded as inventories, in due observance of any regulations in the field of capital market;----------

b) To make cooperation with business entity or any other parties, in the context of joint operation (KSO), joint business (KSU), joint license, Build, Operate and Transfer (BOT), Build, Transfer and Operate (BTO), Build, Operate and Own (BOO) and any agreements of the same characteristic under term and at value exceeding those specified by the Board of Commissioners;----

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

c) To determine and change the Company logo;---

d) To determine the organization structure of 1 (one) level below the Board of Directors;----------

e) To make investment, dispose of investment including the change of capital structure at certain value specified by the Board of Commissioners to other company, subsidiary, and joint venture not in order to secure the account receivables in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

f) To establish subsidiary and / or joint venture at certain value specified by the Board of Commissioners in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

g) To propose the Company representative to be candidate for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of subsidiary company who has given significant contribution to the Company and / or having strategic value, as determined by the Board of Commissioners.---

h) To make merger, amalgamation, takeover, separation, and dissolution of subsidiary

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

company and joint venture at certain value specified by the Board of Commissioners in due observance of any regulations in the field of Capital Market;----------

i) To bind the Company as guarantor (*borg or availist*) at certain value specified by the Board of Commissioners in due observance of any regulations in the field of Capital Market;----------

j) To receive mid / long term loan and provide mid / long term loan at certain value specified by the Board of Commissioners in due observance of any rules in the field of Capital Market;-------

k) To provide short / mid / long term loan of non-operational nature, except for loan to subsidiary company, simply reported to the Board of Commissioners;----------

l) To write off uncollectible receivables and dead inventories at value exceeding limit specified by the Board of Commissioners;----------

m) To take any actions categorized as Material Transaction as set forth in any laws and regulations in the field of Capital Market at certain value specified by the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Board of Commissioners, except that the actions are categorized as Material Transaction excluded by any laws and regulations in the field of Capital Market;-

n) To take any other actions not yet specified in RKAP;----------

o) To waive any rights over business permit for production operation mining or rights over business permit for mining in other form that has legally entered production operation stage.----------

ii. Approval from the Board of Commissioners relevant to (a), (b), €, (f), (g), (h), (l), (j), (k), (l) and (m) hereof at certain limitation and criteria, and (d), (n), and (o) hereof shall be made after obtaining approval from the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*.----------

iii. Limitation and / or criteria specified by the Board of Commissioners in paragraph 7 (i) and 7 (ii) hereof shall me made after obtaining approval from the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*.----------

iv. Authority for approval by the Shareholder of Series-A Share Dwiwarna as referred to in

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(ii) hereof may be empowered to the Majority Shareholder of Series-B Shares.----------

v. Actions of the Board of Directors as referred to in (b) hereof insofar as they are required to execute main business activities prevalently done in relevant field of business in due observance of the provisions of the laws and regulations, shall not require approval from] the Board of Commissioners and / or a GMS.------

(8) Within no later than 30 (thirty) days from receipt of request or explanation and complete documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners must make decision as referred to in paragraph (7) hereof.----------

(9) Board of Directors shall be obliged to ask for approval from the GMS:----------

a. to assign the Company assets; or----------

b. to pledge the Company assets as security for debt;----------

being more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in 1 (one) or more transactions, either those correlated or not, except as the Company business operation, pursuant to Article 3 hereof.----------

(10) a. The following actions may be taken only by the Board of Directors after being responded

FIKRI SAID OBED
PENTERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

in writing from the Board of Commissioners and obtaining approval from the GMS:----------

(1) To take any actions categorized as material transaction set forth by laws and regulations in the field of Capital Market at value above 50% (fifty percent) of the Company equity, except that the actions are categorized as Material Transaction excluded by the prevailing laws and regulations in the field of Capital Market.----------

(2) To make transaction leading to the conflict of interest as set forth in the prevailing laws and regulations in the field of Capital Market.----------

(3) To make any other transactions in order to fulfill the prevailing laws and regulations I the field of Capital Market.----------

b. If within 30 (thirty) days from receipt of request or explanation and any document from the Board of Directors, the Board of Commissioners fail to provide written response, then a GMS may make decision without any written response from the Board of Commissioners.----------

(11) Legal actions as referred to in paragraph (9) and paragraph (10) hereof taken without approval

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

from a GMS shall remain binding to the Company insofar as any other party involved in the legal actions has good faith.----------

(12) GMS may reduce limitation to any actions of the Board of Directors set forth in these Articles of Association or determine any other limitations for the other Board of Directors other than those set forth in these Articles of Association.----------

(13) Management policy shall be decided in the Board of Directors' Meeting by consistently observing and being subject to the provision of Article 5 paragraph 4 c) of these Articles of Association.--

(14) In order to manage the Company, each member of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company according to the Company management policy and authority determined under the Board of Directors' discretion, by consistently observing and being subject to the provision of Article 5 paragraph 4 c) of these Articles of Association.

(15) If not specified otherwise in the Company management policy as referred to in paragraph (14) hereof, President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of

FIKRI SAIDUBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke Indonesia

Directors and represent the Company either inside or outside the Court.

(16) If President Director is unavailable or absent due to any reasons not necessary to be proved to any third party, the President Director shall appoint in writing one of the members of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform any duties of the President Director.-------

(17) In the event the President Director fails to make such appointment, then a member of the Board of Directors holding position for the longest period shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform any duties of the President Director.-------

(18) Board of Directors shall, for certain action on their own responsibility, be also entitled to appoint one or more persons as their representative(s) or proxy(-ies) by granting him (her) or them, powers for certain actions set forth in the power of attorney.----------

(19) Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined by a GMS. In the event the GMS doesn't determine the distribution of duties and authorities, then the distribution thereof among

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the members of the Board of Directors shall be decided on the basis of the Board of Directors' resolutions.----------

(20) Board of Directors shall, in managing the Company, execute any instructions provided by a GMS insofar as not contrary to laws and regulations and / or these Articles of Association.-

(21) A member of the Board of Directors shall have no authority to represent the Company if:

a. There is any case at Court between the Company and the member of the Board of Directors concerned; or----------

b. The Member of the Board of Directors concerned has interest in conflict with the Company interest.----------

(22) In the event there is any condition as referred to in paragraph (21) hereof, ones entitled to represent the Company shall be as follows:----------

a. Any other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company;----------

b. Board of Commissioners, in the event all members of the Board of Directors have the conflict of interest with the Company;----------

c. Any other party appointed by a GMS in the event all members of the Board of Directors

FITRI SAID OBED PENERJEMAH TERSUMPAH B. Indonesia - B. Inggris - B. Inggris - B. Indonesia

or the Board of Commissioners have the conflict of interest with the Company.----------

---------- **BOARD OF DIRECTORS' MEETING** ----------

---------- **ARTICLE 13** ----------

(1) Board of Directors shall be obliged to hold the Board of Directors' Meeting periodically at least 1 (one) time within a month.----------

(2) Board of Directors shall be obliged to hold the Board of Directors' Meeting together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time within 4 (four) months.----------

(3) Board of Directors' Meeting may be held anytime if:----------

a. deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;----------

b. requested in writing by one or more members of the Board of Commissioners.----------

(4) Summons for the Board of Directors' Meeting must be made by a member of the Board of Directors entitled to represent the Board of Directors pursuant to the provision of Article 12 hereof.-----

(5) a. Summons for the Board of Directors' Meeting must be made in writing and submitted or personally delivered to each member of the Board of Directors with sufficient receipt, or via registered mail or by courier service

or via telex, facsimile or electronic mail (e-mail) within no later than 5 (five) days before the meeting, excluding the day of the summons and the day of the meeting or within shorter time in case of urgency.---------

b. Such summons for the meeting as mentioned above shall not be required for any meetings that have been scheduled on the basis of the resolutions of the Board Directors' Meeting held before or if all members of the Board of Directors are present at the meeting.--------

(6) Summons for the Board of Directors' Meeting as referred to in paragraph (5) hereof must state the agenda, date, time and place of the meeting. The Board of Directors' Meeting may be held at the Company domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company business place.----------

(7) Any Board of Directors' Meeting shall be presided over by President Director.----------

(8) In the absence or unavailability of the President Director, then one member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director will preside over the Board of Directors' Meeting.----------

FIKRI SHOBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(9) In the event the President Director fails to make such appointment, then one member of the Board of Directors holding position for the longest period as a member of the Board of Directors will chair the Board of Directors' Meeting.----------

(10) In the event there are more than 1 (one) person holding position for the longest period as members of the Board Directors as referred to in paragraph (9) hereof, then the oldest one thereof will act as chairperson of the Board of Directors' Meeting.----------

(11) A member of the Board of Directors may be represented in a Board of Directors' Meeting only by any other member of the Board of Directors by virtue of the power of attorney. A member of the Board of Directors may represent any other member of the Board of Directors only.----

(12) Member of the Board of Directors who is absent to attend a Board of Directors' Meeting may propose his opinion in writing with signature, to be further submitted to President Director or to any other member of the Board of Directors who will preside over the Board of Directors' Meeting, on whether or not he will support any subject matters to be discussed and the opinion

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

will be deemed as vote to be lawfully cast at the Board of Director's Meeting.----------

(13) Board of Directors' Meeting shall be valid and entitled to adopt any binding resolutions if more than 1/2 (a half) of total members of the Board of Directors are present and / or represented at the meeting.----------

(14) In the event there are more than one proposal, then voting shall be done again, until 1 (one) proposal obtains votes more than 1/2 (a half) of total votes cast.----------

(15) Resolutions of the Board of Directors' Meeting must be adopted by mutual consensus. In the event of failure to reach the mutual consensus, then resolutions shall be adopted by voting on the basis of affirmative votes more than ½ (a half) of total votes lawfully cast at the meeting concerned.----------

(16) At the Board of Directors Meeting, each member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for any other member of the Board of Directors he represents legally at the meeting.----------

(17) Abstaining (blank) vote shall be considered to have approved any proposal submitted at the meeting. Invalid vote shall be deemed inexistent

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

and shall not be counted in determining the number of votes cast at the meeting.----------

(18) Voting on person shall be done by using folded ballots without signature, whereas voting on any other matters shall be done orally, unless the Chairperson of Meeting determines otherwise without any objection based on majority votes from those being present.----------

(19) a. Results of Meeting as referred to in paragraph (1) hereof must be poured out in Minutes of Meeting. Minutes of Meeting must be prepared by someone being present at the meeting appointed by the Chairperson of Meeting, to be further signed by all members of the Board of Directors being present and submitted to all members of the Board of Directors.----------

b. Results of Meeting as referred to in paragraph (2) hereof must be poured out in Minutes of Meeting. Minutes of Meeting must be prepared by someone being present at the meeting appointed by the Chairperson of Meeting, to be further signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners being present and submitted to all members of the Board

FIKRI SHABED PENERJEMAH TERSUMPAH B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of Directors and all members of the Board of Commissioners.----------

c. In the event there is any member of the Board of Directors and / or member of the Board of Commissioners who doesn't sign the results of meeting as referred to in a) and b) hereof, the person concerned shall be obliged to state any reasons thereof in writing in a separate note attached to the minutes of meeting.----------

d. Minutes of meeting as referred to in a) and b) hereof must be documented by the Company.----------

e. Minutes of the Board of Directors' Meeting constitute valid evidence for the members of the Board of Directors and for any third party regarding any decisions made at the meeting in question.----------

(20) a. Board of Directors may also adopt any valid resolutions without holding a Board of Directors' Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing thereof and all members of the Board of Directors agree upon proposal submitted in writing by signing the proposal.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. Resolutions adopted in such manner shall have same force as those adopted lawfully in a Board of Directors' Meeting.----------

(21) In the event a member of the Board of Directors is physically absent, then the member of the Board of Directors may attend the meeting through teleconference media, video conference, or by means of any other electronic media, pursuant to applicable rules.----------

(22) Each member of the Board of Directors who personally in any manner either directly or indirectly has interest in a transaction, contract or proposed contract in which the Company is one of parties, his interest must be declared in a Board of Directors' Meeting, and thereby he is not entitled to cast vote on any matters related to the transaction or contract.----------

---------- **BOARD OF COMMISSIONERS** ----------

---------- **ARTICLE 14** ----------

(1) a. Supervision to the Company shall be done by the Board of Commissioners, the number of which is adjusted to needs, comprised of at least 2 (two) members, one of which shall be appointed as President Commissioner.---------

b. Board of Commissioners shall consist of Commissioner and Independent Commissioner.------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Number of Independent Commissioner shall conform to the provisions of the prevailing laws and regulations.----------

(2) Board of Commissioners shall constitute a Board and each member of the Board of Commissioners can not act individually, but pursuant to the resolutions of the Board of Commissioners.----------

(3) Members of the Board of Commissioners shall be obliged to follow the following terms:----------

a. Limited Liability Company Law;----------

b. Laws and regulations in the field of Capital Market; and----------

c. Any other laws and regulations applicable to the Company and any other laws and regulations relevant to the Company business activities.----

(4) One eligible to be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be an individual person who meets any requirements when appointed and during his term of office:----------

a. shall have good character, moral and integrity;-

b. shall be competent in taking any legal actions;-

c. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:----------

1) shall never be declared insolvent;----------

2) shall never become a member of the Board of Directors and / or a member of the Board

IKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of Commissioners declared guilty for causing insolvency of a company;----------

3) shall never be punished for committing criminal action that harms the state finance and / or relevant to financial sector; and----------

4) shall never become a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during his term of office:----------

a) ever fails to hold an annual GMS;--------

b) is ever rejected by the GMS with respect to his accountability as a member of the Board of Directors and / or as a member of the Board of Commissioners or ever fails to provide accountability as a member of the Board of Directors and / or as a member of the Board of Commissioners to the GMS; and----------

c) ever makes a company which obtain permit, approval, or registration from OJK (the Financial Service Authority) unable to fulfill its obligations to submit annual report and / or financial statement to OJK.----------

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

d. shall be committed to comply with any laws and regulations;----------

e. shall have knowledge and / or expertise in a field required by the Company; and----------

f. shall fulfill any other requirements as set forth in paragraph (3) hereof.----------

(5) Fulfillment of requirements as referred to in paragraph (4) hereof shall be proved by written statement signed by candidate for the member of the Board of Commissioners and the written statement shall be submitted to the Company.--------

(6) The Company shall be obliged to hold a GMS to make substitution of any member of the Board of Commissioners not fulfilling the requirements.---

(7) Appointment of the member of the Board of Commissioners not fulfilling the requirements as referred to in paragraph (3) hereof shall be null and void since any other member of the Board of Commissioners or the Board of Directors found the same on the basis of valid proof, and the member of the Board of Commissioners concerned shall be notified in writing thereof in due observance of the laws and regulations.----------

(8) Within no later than 2 (two) working days from finding of appointment of the member of the Board of Commissioners not fulfilling the requirements,

ZUKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

any other member of the Board of Commissioners must announce cancellation of the appointment of the member of the Board of Commissioners concerned in publication, and within no later than 7 (seven) days from finding that the appointment of the member of the Board of Commissioners fails to fulfill the requirements, shall notify the Minister in charge of laws thereof for recordation pursuant to laws and regulations.----------

(9) Legal Actions which have been taken for and on behalf of the Company by a member of the Board of Commissioners not fulfilling the requirements before the cancellation of appointment of the member of the Board of Commissioners shall remain binding and shall be the responsibilities of the Company.----------

(10) Legal Actions which have been taken for and on behalf of the Company by the member of the Board of Commissioners not fulfilling the requirements after the cancellation of appointment thereof shall be invalid and shall be the personal responsibilities of the member of the Board of Commissioners concerned.----------

(11) In addition to fulfilling the criteria as referred to in paragraph (3) and paragraph (4) hereof,

FAKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the appointment of the members of the Board of Commissioners shall be made by considering integrity, dedication, understanding on any company management issues related to one of management functions, sufficient knowledge in the field of the Company business, and the availability of sufficient time for execution of duties, and any other requirements pursuant to laws and regulations.----------

(12) Any Members of the Board of Commissioners shall be appointed and discharged by a GMS in due observance of the provisions of these Articles of Association where the GMS shall be attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the Resolutions of the Meeting must be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*. The members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*, and such nomination shall bind on the GMS.----------

This provision shall apply also to a GMS held in order to revoke and confirm the decision of suspension of the members of the Board of Directors by the Board of Commissioners.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(13) Resolutions of a GMS regarding the appointment and discharge of the members of the Board of Commissioners also specify the commencement of validity of the appointment and discharge. In the event the GMS fails to specify the same then the appointment and discharge of the members of the Board of Commissioners shall take effect as of the closing of the GMS.----------

(14) a. Any members of the Board of Commissioners shall be appointed for a timeframe as of the date appointed by a GMS which makes appointment thereof and shall end on the closing of the 5th (Fifth) Annual GMS after the date of their appointment, provided that the timeframe shall not exceed 5 (five) years, in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market, without prejudice to the rights of the GMS to anytime discharge the members of the Board of Commissioners before expiration of their term of office.----------

b. After expiration of their term of office, the members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for one term of office.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(15) A member of the Board of Commissioners may be discharged by a GMS by stating any reasons thereof.----------

(16) Reasons for discharge of the member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph (15) hereof shall arise if based on facts the member of the Board of Commissioners concerned:-----

a. is unable to perform their duties properly;-----

b. violates the provisions of these Articles of Association and / or any laws and regulations;--

c. is involved in any action that harms the Company and / or state;----------

d. commits action that infringes ethics and / or propriety which should be honored as a member of the Board of Commissioners;----------

e. is declared guilty by virtue of the court judgment having a permanent force of laws;------

f. resigns.----------

(17) In addition to reasons for discharge of the member of the Board of Commissioners as referred to in f) hereof, the member of the Board of Commissioners may be discharged by a GMS based on any other reasons deemed correct by the GMS for the company interests and objectives.----------

(18) Decision for discharge due to any reasons as referred to in paragraph (16) a, b, c, d and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

paragraph (17) hereof shall be made after the person concerned has been given the opportunity to defend himself in a GMS.----------

(19) Discharge for reasons as referred to in paragraph (16) c) and e) hereof constitutes dishonorable discharge.----------

(20) Among the members of the Board of Commissioners and between the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors shall have no blood family relationship until the third generation, either based on vertical line or horizontal line or in-law family relationship / family relationship arising from marriage, including child-in-law or brother-in-law (sister-in-law).----------

(21) In the event condition as referred to in paragraph (17) hereof occurs, then a GMS shall be authorized to discharge one of them.----------

(22) Distribution of works among the members of the Board of Commissioners shall be stipulated by themselves, and for the smoothness of their duties the Board of Commissioners must form a Secretariat of the Board of Commissioners chaired by the Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(23) If at any time for any reasons, one or more positions of the members of the Board of Commissioners are vacant:----------

a. GMS must be held to fill such vacant position(s) if such vacancy makes the Board of Commissioners less than 2 (two) persons, one of which is President Commissioner or the vacant position(s) is (are) President Commissioner.----------

b. GMS as referred to in a) hereof shall be held within no later than 90 (ninety) days after the vacancy as referred to in a) hereof.--

(24) If at any time for any reasons, all positions of the members of the Board of Commissioners are vacant, then the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* may appoint temporarily the acting member of the Board of Commissioners to perform any duties of the Board of Commissioners with same authorities, provided that within no later than 90 (ninety) days after the vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy of the position in the Board of Commissioners.----------

(25) a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his position before expiration of his term of office by

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

notifying in writing the Company of his intention;----------

b. The Company shall be obliged to hold a GMS to decide request for resignation of the member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after receipt of request letter for the resignation.----------

c. The Company shall be obliged to make information disclosure to the public and shall submit to OJK (the Financial Service Authority) within no later than 2 (two) working days after receipt of request for resignation of the member of the Board of Commissioners as referred to in a) hereof and the results of the GMS as referred to in b) hereof;---------

d. Before effect of the resignation, the member of the Board of Commissioners concerned shall remain obliged to complete his duties and responsibilities pursuant to these Articles of Association and the laws and regulations;----

e. Accountability as a member of the Board of Commissioners from his appointment until the date of approval for his resignation in the GMS may remain possible to the resigning member of the Board of Commissioners as mentioned above.----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

f. Discharge and acquittal of responsibilities to a resigning member of the Board of Commissioners will be granted after an Annual GMS has acquitted him.----------

g. In the event the resignation of the member of the Board of Commissioners makes the number of the members of the Board of Commissioners less than 2 (two) persons, then the resignation shall be valid if has been decided by a GMS and new member of the Board of Commissioners has been appointed so that the minimum requirement for the number of the members of the Board of Commissioners has been fulfilled.----------

(26) Position as a member of the Board of Commissioners shall end in case of:----------

a. His resignation having taken effect, as referred to in paragraph (25) b) hereof;--------

b. Death;----------

c. Expiration of his term of office;----------

d. Discharge by virtue of the resolutions of the GMS;----------

e. Insolvency declared by the Commercial Tribunal having a permanent force of laws or being put under guardianship by virtue of court judgment;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke B. Indonesia - B. Indonesia ke B. Inggris

f. Failure to fulfill any requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and any laws and regulations.-------

(27) Provision as referred to in paragraph (26) f) including but not limited to double position shall be prohibited.----------

(28) Member of the Board of Commissioners who quits before or after his expired term of office, except for quit due to death, then the person concerned shall remain responsible for his actions which accountability has not yet been accepted by a GMS.----------

(29) Members of the Board of Commissioners shall be prohibited from holding double position as:---------

a. member of the Board of Directors of State-Owned Enterprise, Region-Owned Enterprise, Private-Owned Enterprise, except for member of the Board of Directors in State-Owned Enterprise as the Majority Shareholder of Series-B Shares;----------

b. political party administrator and / or candidate for member / member of DPR (Legislative Assembly), DPD (Regional Representative Council), DPRD (Regional People's Representative Assembly) at provincial level, and DPRD at

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

regency / city level and / or candidate for regional head / regional head deputy;----------

c. any other positions pursuant to the provisions of the laws and regulations; and / or----------

d. any other positions which may cause the conflict of interest.----------

(30) Members of the Board of Commissioners may be given honorarium and benefits / facilities including *tantiem* and retirement compensation with type and in amount determined by a GMS, in due observance of the provisions of the laws and regulations.------

---- **DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD** ----

---------- **OF COMMISSIONERS** ----------

---------- **ARTICLE 15** ----------

(1) Board of Commissioners shall have duties to make supervision to management policy, management in general, either regarding the Company or the Company business carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including supervision to the execution of the Company's Long Term Plan, the Company Work Plan and Budget, Board of Director's Management Contract and the provisions of these Articles of Association and the Resolutions of the GMS, and any laws and regulations, in the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

interest of the Company and according to the Company purposes and objectives.----------

(2) In performing any duties as referred to in paragraph (1) hereof, then:----------

a. The Board of Commissioners shall be authorized:-

1) to examine any books, letters, and any other documents, check cash for verification needs and any other commercial papers, and inspect the Company assets;----------

2) to have access to yard, building, and office used by the Company;----------

3) to ask for clarification from the Board of Directors and / or any other officers with respect to any issues relevant to the Company management;----------

4) to know any policies and actions that have and will be executed by the Board of Directors;----------

5) to ask the Board of Directors and / or any other officers below the Board of Directors with the Board of Directors' knowledge to attend the Board of Commissioners' Meeting.----------

6) to appoint and discharge the Secretary of the Board of Commissioners;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

7) to suspend a member of the Board of Directors pursuant to the provisions of the Articles of Association;----------

8) to form Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and any other committees, if deemed necessary by considering the company capacity;----------

9) to use expert personnel for certain matters and within certain term at the Company's expenses, if deemed necessary;----

10) to take any actions of management to the Company in certain situation and for certain term pursuant to the provisions of these Articles of Association;----------

11) to approve the appointment and discharge of the Company Secretary and / or the Head of Internal Supervisory Unit;----------

12) to attend the Board of Directors' Meeting and give opinion on any matters discussed.--

13) to execute any other supervisory authorities insofar as not contrary to the laws and regulations, these Articles of Association, and / or the resolutions of the GMS;--------

b. The Board of Commissioners shall be obliged:----



1) provide advice to the Board of Directors in managing the Company;----------

2) to give opinion and approval on the Company Work Plan and Annual Budget and any other work plans prepared by the Board of Directors, pursuant to the provisions of these Articles of Association;

3) to follow the Company activity progress, give opinion and recommendation to a GMS on any issues deemed important for the Company management;----------

4) To make report to the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and the proxy of the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* when there is any indication of the Company performance decline and / or there is any urgent and strategic problem;----------

5) to nominate Public Accountant in a GMS for audit of the Company books;----------

6) to examine and review periodic report and annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report;-------

7) to provide explanation, opinion and suggestion to a GMS on the Annual Report, if requested;----------

FIKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

8) to prepare the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and keep their copy;-

9) to make report to the Company on their share ownership and / or their family members involved in the Company and any other company;----------

10) to give report on any supervisory duties that have been executed during the recent fiscal year to a GMS;----------

11) to provide clarification on any matters questioned or requested by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* in due observance of the laws and regulations, particularly in the field of Capital Market;----------

12) to execute any other obligations for the purpose of supervisory duties and advice provision, insofar as not contrary to laws and regulations, these Articles of Association, and / or the resolutions of the GMS.----------

(3) In performing his duties, each member of the Board of Commissioners:----------

a. Must comply with these Articles of Association and the laws and regulations, and the principles of professionalism, efficiency, transparency;

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

independence, accountability, responsibility and reasonability;----------

b. Must have good faith, have full of caution, and be responsible in performing any supervisory duties and advice provision to the Board of Directors for the benefit of the Company and according to the purposes and objectives of the Company.----------

(4) In certain condition, the Board of Commissioners must hold an annual GMS and any other GMS according to their authorities as set forth in the laws and regulations and these Articles of Association.----------

(5) a. Each member of the Board of Commissioners shall be responsible individually and collectively for the Company loss caused by mistake or negligence of the member of the Board of Commissioners in performing his duties.---------

b. Members of the Board of Directors shall not be accountable for the Company loss as referred to in a) hereof, if they can prove that:----------

1. the loss is not their mistake or negligence;
2. they have worked in good faith, with full of responsibility and caution, for the

IKRI SAIDOBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

benefit of, and according to the purposes and objectives of, the Company;----------

3. they have no conflict of interest, either directly or indirectly for any actions of supervision that cause the loss; and-----

4. they have taken any actions to prevent the occurrence or continuance of the loss.--

---------- **BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING** ----------

---------- **ARTICLE 16** ----------

(1) Any resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted at the Board of Commissioners' Meeting.----------

(2) Board of Commissioners shall be obliged to hold the meeting at least 1 (one) time within a month.----------

(3) Board of Commissioners shall be obliged to hold the meeting together with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time within 4 (four) months.----------

(4) Board of Commissioners may hold the meeting anytime at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, by stating any matters to be discussed.----------

(5) Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be made by President Commissioner.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(6) In the absence or unavailability of the President Commissioner not necessary to be proved to any third party, then the Board of Commissioners' Meeting shall be presided over by a member of the Board of Commissioners being present and appointed at the Meeting.----------

(7) a. Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be made in writing and submitted or personally delivered to each member of the Board of Commissioners with sufficient receipt, or via registered mail or by courier service or via telex, facsimile or electronic mail (e-mail) within no later than 5 (five) days before the meeting, excluding the day of the summons and the day of the meeting or within shorter time in case of urgency.------

b. Such summons for the meeting as mentioned above shall not be required for any meetings that have been scheduled on the basis of the resolutions of the Board Commissioners' Meeting held before.----------

(8) Summons for the Board of Commissioners' Meeting as referred to in paragraph (5) hereof must state the agenda, date, time and place of the meeting. The Board of Commissioners' Meeting may be held at the Company domicile or elsewhere

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company business place.----------

(9) Any Board of Commissioners' Meeting shall be presided over by President Commissioner.----------

(10) In the absence or unavailability of the President Commissioner, then the Board of Commissioners' Meeting shall be presided over by one other member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.----------

(11) In the event the President Commissioner fails to make such appointment, then a member of the Board of Commissioners holding position for the longest period as a member of the Board of Commissioners will chair the Board of Commissioners' Meeting. Board of Commissioners' Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended and / or represented by more than 1/2 (a half) of total members of the Board of Commissioners.----------

(12) In the event there are more than 1 (one) person holding position for the longest period as members of the Board Commissioners as referred to in paragraph (11) hereof, then the oldest one thereof will act as chairperson of the meeting.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(13) In the event there are more than one proposal, then voting shall be done again, until 1 (one) proposal obtains votes more than 1/2 (a half) of total votes cast.----------

(14) At the Board of Commissioners' Meeting, each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for any other member of the Board of Commissioners he represents legally at the meeting.-

(15) Abstaining (blank) vote shall be considered to have approved any proposal submitted at the meeting. Invalid vote shall be deemed inexistent and shall not be counted in determining the number of votes cast at the meeting.----------

(16) Voting on person shall be done by using folded ballots without signature, whereas voting on any other matters shall be done orally, unless the Chairperson of Meeting determines otherwise without any objection based on majority votes from those being present.----------

(17) Resolutions of the Board of Commissioners' Meeting must be adopted by mutual consensus. In the event of failure to reach the mutual consensus, then resolutions shall be adopted by voting on the basis of affirmative votes more than 1/2

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(a half) of total votes lawfully cast at the meeting concerned.----------

(18) a. Results of Meeting as referred to in paragraph (2) hereof must be poured out in Minutes of Meeting. Minutes of Meeting must be prepared by someone being present at the meeting appointed by the Chairperson of Meeting, to be further signed by all members of the Board of Commissioners being present and submitted to all members of the Board of Commissioners.----------

b. Results of Meeting as referred to in paragraph (3) hereof must be poured out in Minutes of Meeting. Minutes of Meeting must be prepared by someone being present at the meeting appointed by the Chairperson of Meeting, to be further signed by all members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors being present and submitted to all members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors.----------

c. In the event there is any member of the Board of Commissioners and / or member of the Board of Directors who doesn't sign the results of meeting as referred to in a) and b) hereof,

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bhs Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

the person concerned shall be obliged to state any reasons thereof in writing in a separate note attached to the minutes of meeting.----------

d. Minutes of meeting as referred to in a) and b) hereof must be documented by the Company.----------

e. Minutes of the Board of Commissioners' Meeting constitute valid evidence for the members of the Board of Commissioners and for any third party regarding any decisions made at the Meeting in question.----------

(19) a. Board of Commissioners may also adopt any valid resolutions without holding a Board of Commissioners' Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing thereof and all members of the Board of Commissioners agree upon proposal submitted in writing by signing the proposal.----------

b. Resolutions adopted in such manner shall have same force as those adopted lawfully in a Board of Commissioners' Meeting.----------

(20) In the event a member of the Board of Commissioners is physically absent, then the member of the Board of Commissioners may attend the meeting

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

through teleconference media, video conference, or by means of any other electronic media, pursuant to applicable rules.----------

(21) Each member of the Board of Commissioners who personally in any manner either directly or indirectly has interest in a transaction, contract or proposed contract in which the Company is one of parties, his interest must be declared in a Board of Commissioners' Meeting, and thereby he is not entitled to cast vote on any matters related to the transaction or contract.----------

---------- **WORK PLAN AND ANNUAL BUDGET** ----------

---------- **ARTICLE 17** ----------

(1) Board of Directors shall be obliged to prepare Work Plan and Annual Budget of the Company for each fiscal year, at least containing:----------

a. mission, business target, business strategy, company policy, and work / activity program;----

b. Company work program;----------

c. Company budget detailed into each work program budget / activity;----------

d. financial projection of the Company and its subsidiary company;----------

e. The Company's social and environmental responsibility Program;----------

f. Risk management;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

g. Breakdown of strategic plan on the Company Information Technology;----------

h. Board of Commissioners' Work Program; and-------

i. Any other Matters requiring the Board of Commissioners' decision;----------

(2) Board of Commissioners shall be obliged to prepare the Board of Commissioners' work program being an inseparable part of the Company's Work Plan and Annual Budget prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph (1) hereof.----------

(3) Draft Work Plan and Annual Budget of the Company which have been signed by all members of the Board of Directors shall be submitted to the Board of Commissioners, within no later than 30 (thirty) days before commencement of new fiscal year or within timeframe set forth in laws and regulations, to obtain approval from the Board of Commissioners.----------

(4) In due observance of paragraph 3 hereof, the Draft Work Plan and Annual Budget of the Company shall be approved by the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) days after current fiscal year (fiscal year of Work Plan and Annual Budget of the Company) or within timeframe set forth in the laws and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris B.Inggris ke B.Indonesia

regulations. Board of Commissioners' Approval relevant to this paragraph may be decided after obtaining approval from the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* or its proxy.----------

(5) In the event the draft Work Plan and Company Budget have not yet been submitted by the Board of Directors and / or the Company Work Plan and Budget have not yet been approved within timeframe as referred to in paragraph (4) hereof, then previous year Company Work Plan and Budget will take effect.----------

---------- **FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT** ----------

---------- **ARTICLE 18** ----------

(1) The Company's Fiscal Year shall commence from 1st (the first) day of January until 31st (the thirty first) day of December of the same year. At the end of December each year, the Company's book shall be closed.----------

(2) Board of Directors shall be obliged to prepare Annual Report that contains at least:----------

a. report regarding Company activity;----------

b. summary of important financial data;----------

c. information on share (if any);----------

d. Board of Directors' report;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

e. Board of Commissioners' report, including report regarding supervisory duties that have been executed during the recent fiscal year;---------

f. Company profile;-------------------------------

g. management analysis and discussion;-------------

h. Company governance;----------------------------

i. report on the Company's social and environmental responsibility execution;----------------------

j. audited annual financial statement;-------------

k. detail of issues arising during the fiscal year which affects the Company business activity;-------------------------------------

l. name of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

m. other salary and benefit for the members of the Board of Directors, and other salary or honorarium and benefit for the members of the Board of Commissioners of the recent fiscal year;---

n. written statement of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners regarding responsibility for Annual Report; and----------------------------

o. other matters obliged pursuant to the prevailing laws and regulations.----------------------------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(3) Board of Commissioners shall be obliged to prepare report on supervisory duties that have been executed by the Board of Commissioners during the recent fiscal year being the inseparable part of the annual report prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph (2) hereof.----------

(4) Draft Annual Repot including financial statement which have been audited by public accountant, signed by all members of the Board of Directors shall be submitted to the Board of Commissioners for review and signing before submission to an Annual GMS for approval and validation.----------

(5) Annual Report as referred to in paragraph (2) hereof, signed by all Members of the Board of Directors and all Members of the Board of Commissioners shall be submitted by the Board of Directors to Shareholders within no later than 5 (five) months after expiration of the Fiscal Year in due observance of applicable provisions.----------

(6) In the event there is any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners not signing the annual report, any reasons thereof must be stated in writing or the reasons shall

FITRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

be declared by the Board of Directors in separate note attached to the annual report.----------

(7) In the event there is any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners not signing the annual report as referred to in paragraph (5) hereof, and no written reason is given, the person concerned shall be considered to have approved the contents of the annual report.-

(8) Approval for Annual Report including the validation of financial statement as referred to in paragraph (2) hereof shall be provided by an Annual GMS at the latest on 6th (the sixth) month after expiration of the fiscal year.---

(9) Approval for annual report, including validation of annual financial statement and report on supervisory duties of the Board of Commissioners and profit use decision shall be provided in Annual GMS.----------

(10) Approval for Annual Report including report on supervisory duties of the Board of Commissioners and validation of financial statement by the Annual GMS, shall mean the grant of discharge and acquittal to the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners for any actions of management and supervision that have been performed during the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

last fiscal year, insofar as the actions are stated in annual report, including financial statement, report on supervisory duties by the Board of Commissioners, and conform to applicable provisions.----------

(11) Annual Report including Financial Statement as referred to in paragraph (4) hereof must be made available at the Company Head Office as of the date of summons until the date of the Annual GMS.----------

(12) The Company shall be obliged to announce the Financial Statement including Balance Sheet and Profit/Loss Statement in newspaper using Indonesian language and circulated nationally according to procedures as set forth in regulation in the field of Capital Market.----------

---------- **REPORTING** ----------

---------- **ARTICLE 19** ----------

(1) Board of Directors shall be obliged to prepare periodic report that contains the execution of the Company Work Plan and Budget.----------

(2) Periodic report as referred to in paragraph (1) hereof shall include quarterly report and annual report.----------

(3) Other than the periodic report as referred to in paragraph (2) hereof, the Board of Directors

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

may anytime provide special report to the Board of Commissioners and / or the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* or its proxy.----------

(4) Periodic Report and any other reports as referred to in paragraph (1) and paragraph (3) hereof, shall be submitted in form, contents and procedures of preparation pursuant to laws and regulations.----

(5) Board of Directors shall be obliged to submit quarterly report to the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) days after the expiration of the quarterly period.----------

---------- **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** ----------

---------- **ARTICLE 20** ----------

(1) GMS of the Company shall mean:----------

a. Annual GMS as referred to in Article 21 hereof.-

b. Other GMS, namely a GMS held anytime according to needs, as set forth in Article 22 hereof.----

(2) GMS in these Articles of Association shall mean both "Annual GMS" and "Other GMS", unless expressly stated otherwise.----------

(3) Board of Directors shall hold the Annual GMS and the Other GMS. GMS may be held at the request of shareholder or the Board of Commissioners in due observance of the provisions of article (4) hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(4) Request for Holding of the GMS by Shareholder or the Board of Commissioners;----------

a. Holding of the GMS may be made at the request of:----------

i. Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*;--

ii. Board of Commissioners; or----------

iii. One or more Shareholders, either individually or collectively representing 1/10 (one tenth) or more of total shares issued by the Company with valid voting rights, by fulfilling the provisions of these Articles of Association and the laws and regulations.-

b. Request for holding of the GMS as referred to in a) hereof shall be submitted to the Board of Directors via registered mail along with any reasons thereof, with copy to be sent to the Board of Commissioners.-------

c. Request for holding of the GMS as referred to in a) hereof:----------

1) must be made in good faith;----------

2) must consider the Company interest;---------

3) must be accompanied with any reasons thereof and subject matter to be decided in the GMS; and----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

4) shall not be contrary to the laws and regulations and these Articles of Association.----------

d. Proposal for holding of the GMS from shareholder as referred to in a) hereof must be a request which requires the resolutions of the GMS and upon the Board of Directors' opinion shall have fulfilled any requirements in c) hereof.----------

e. Board of Directors shall be obliged to make announcement on the GMS to any shareholders within no later than 15 (fifteen) days from receipt by the Board of Directors of the request for holding of the GMS as referred to in a) hereof.----------

f. In the event the Board of Directors fails to make announcement on the GMS as referred to in e) hereof, shareholder may resubmit request for holding of the GMS to the Board of Commissioners.----------

g. Board of Commissioners shall be obliged to make announcement of the GMS to shareholder within no later than 15 (fifteen) days from receipt by the Board of Commissioners of the request for holding of the GMS as referred to in f) hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

h. In the event the Board of Directors or the Board of Commissioners fail to make announcement of the GMS within timeframe as referred to in e) and g) hereof, the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce:----

1) that there is any request for holding of the GMS from shareholder as referred to in a) hereof;----------

2) any reason for not holding the GMS.---------

i. Announcement as referred to in h) hereof shall be made within no later than 15 (fifteen) days from receipt of the request for holding of the GMS from shareholder as referred to in a) and f) hereof.----------

j. Announcement as referred to in e), g) and h) hereof shall be made at least through:-------

1) website which provides e-RUPS (e-GMS);------

2) website of the Stock Exchange;----------

3) website of the Company;----------

in Indonesian Language and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.----------

k. Announcement as referred to in j) hereof in language other than Indonesian Language must contain same information as that in announcement using Indonesian Language.----------

FIKRI SAHROBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

l. In the event there is any difference of interpretation to announcement information as referred to in k) hereof then information used as reference shall be that in Indonesian Language.----------

m. In the event the Board of Commissioners fail to make announcement of the GMS as referred to in g) hereof, then shareholder as referred to in a) hereof may submit request for holding of the GMS to the head of district court whose jurisdiction includes the Company domicile for decision of the grant of permit to hold the GMS.----------

n. Shareholder who has obtained court judgment to hol the GMS as referred to in m) hereof:-----

1) must make announcement, summons for holding of the GMS, announcement on the summarized minutes of the GMS, with respect to the GMS held pursuant to OJK Regulation.--------

2) must make notification that the GMS will be held and must submit the proof of announcement, the proof of summons, the minutes of the GMS, and the proof of announcement on the summarized minutes of the GMS with respect to the GMS held, to OJK pursuant to OJK Regulation.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

3) must attach any documents that contain the names of shareholders and their shareholding in the Company which have been confirmed by court judgment to hold the GMS and court judgment in notification as referred to in 2) hereof, to OJK in relation to the GMS to be held.----------

o. In the event the Board of Directors fail to make announcement of the GMS as referred to in e) hereof upon proposal of the Board of Commissioners, then within no later than 15 (fifteen) days from receipt of request for holding of the GMS, the Board of Directors must announce:----------

1) that there is any request for holding of the GMS from the Board of Commissioners, but not held;----------

2) any reason for not holding the GMS.---------

p. In the event the Board of Directors have made announcement as referred to in o) hereof or a timeframe of 15 (fifteen) days has elapsed, then the Board of Commissioners themselves shall hold the GMS.----------

q. Board of Commissioners must make announcement on the GMS to the shareholders within no later than 15 (fifteen) days from the date

FIRDAUS SAID ORBIT
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of announcement as referred to in o) hereof or after such timeframe of 15 (fifteen) days as referred to in p) hereof has been elapsed.---

r. Board of Commissioners must submit notification on the meeting agenda to the Financial Service Authority (OJK) within no later than 5 (five) working days before announcement as referred to in q) hereof.----------

s. Notification on the GMS agenda at the request of the Board of Commissioners must also contain information that the Board of Directors fail to hold the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners themselves hold the GMS they proposed.----------

t. Shareholder as referred to in a) hereof shall not transfer its shareholding as set forth in Article 10 paragraph (9) hereof.----------

--------- **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** ---------

---------- **ARTICLE 21** ----------

(1) Annual GMS shall be held every year, within no later than 6 (six) months after expiration of fiscal year pursuant to laws and regulations, except that the OJK specify time other than that set forth in this paragraph.----------

(2) In the Annual GMS:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

a. Board of Directors must submit an annual report as referred to in Article 18 hereof;-----

b. Board of Directors must submit the Company's net profit use proposal, if the Company has positive earnings;----------

c. Public Accountant Office registered with the Financial Service Authority (OJK) shall be appointed, as proposed by the Board of Commissioners, to make audit to the Company's Financial Statement of current year, including the audit of internal control for financial statement; pursuant to applicable provisions from capital market authority where the Company share are registered and / or recorded;-

d. Board of Directors may propose other matters for the benefit of the Company pursuant to the provisions of these Articles of Association.

(3) Approval by GMS for annual report including validation of financial statement and report on supervisory duties of the Board of Commissioners shall mean the grant of full discharge and acquittal of responsibility to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the previous fiscal year, as long as such actions are reflected in the annual report and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke Indonesia

the financial statement, except for any actions of embezzlement, fraud and any other criminal actions.----------

--------- **OTHER GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** ----------

---------- **ARTICLE 22** ----------

Other General Meeting of Shareholders may be held anytime according to the Company needs or interests.------

------- **PLACE, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, SUMMONS** -------

------- **AND TIME FOR HOLDING OF THE GENERAL MEETING** ------

---------- **OF SHAREHOLDERS** ----------

---------- **ARTICLE 23** ----------

(1) The Company shall be obliged to determine place and time for holding of the GMS.----------

(2) Place for holding of the GMS must be within the territory of the Republic of Indonesia, namely:-

a. domicile of the Company;----------

b. place where the Company conducts its principal business activities;----------

c. provincial capital where the Company is domiciled or conducts its principal business activity; or----------

d. province where the Stock Exchange is domiciled where the Company shares are listed.----------

(3) Board of Directors shall hold the GMS preceded by notice for the GMS to OJK (the Financial

FIKRI SAID ODED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Service Authority), announcement of the GMS and summons for the GMS as set forth in this Article.---

(4) Notice for the GMS to OJK shall be made under the following terms:----------

a. The Company must submit notification on the agenda of the RUPS to OJK within no later than 5 (five) working days before announcement of the GMS, excluding the day of the announcement of the GMS.----------

b. Agenda of the GMS as referred to in a) hereof must be disclosed clearly and in detail.-

c. In the event there is any change of the agenda of the GMS as referred to in b) hereof, the Company must inform on the change of the agenda to OJK at the latest on the date of summons for the GMS.----------

d. Provisions in a), b) and c) hereof shall, mutatis-mutandis, apply to notification for holding of the GMS by shareholders, confirmed by court judgment for holding of the GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) n) hereof.----------

(5) Announcement of the GMS shall be made under the following provisions:----------

a. The Company must make announcement of the GMS to shareholders within no later than 14

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(fourteen) days before summons for the GMS, excluding the day of the announcement and the day of the summons.----------

b. Announcement of the GMS as referred to in a) hereof shall at least state:----------

1) provision on any shareholders entitled to be present at the GMS;----------

2) provision on shareholders entitled to propose the agenda of the GMS;----------

3) date of holding of the GMS; and----------

4) date of summons for the GMS.----------

c. In the event the GMS is held at the request of shareholder or the Board of Commissioners, in addition to containing those referred to in b) hereof, then the announcement of the GMS as referred to in a) hereof must contain information that the Company will hold the GMS due to any request from the shareholder or the Board of Commissioners.------

d. Announcement of the GMS to shareholders as referred to in a) hereof shall be made at least through:----------

1) website which provides e-RUPS (e-GMS);------

2) website of the Stock Exchange; and----------

3) website of the Company.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

in Indonesian Language and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.----------

e. Announcement using Foreign Language must contain information in the announcement using Indonesian Language.----------

f. In the event there is any difference of interpretation to information announced in Foreign Language to that in Indonesian Language, then information in Indonesian Language shall serve as reference.----------

g. In the event the GMS is held at the request of shareholder, then the submission of proof to the announcement of the GMS as referred to in g) hereof shall be accompanied with the copy of request letter for holding of the GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) hereof.----------

h. Announcement of the GMS, to decide transaction that contains the conflict of interest shall be made by following Capital Market regulation.-

i. Provisions in a) until f) hereof shall, mutatis mutandis, apply to announcement for holding of the GMS by shareholder confirmed by court judgment to hold the GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) n) hereof.-------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

(6) Proposal for agenda of the meeting may be submitted by Shareholder under the following terms:-

a. Shareholder may propose in writing agenda of the Meeting to the Board of Directors within no later than 7 (seven) days before summons for the GMS.----------

b. Shareholders which may propose agenda of the Meeting as referred to in a) hereof shall be:----------

(1) Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna*;-----

(2) 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of total shares issued by the Company with valid voting shares.----------

c. Proposal for agenda of the Meeting as referred to in a) hereof:----------

1) must be submitted in good faith;----------

2) must consider the Company interest;---------

3) must state any reasons thereof and subject matter for the agenda of the Meeting; and---

4) shall not be contrary to laws and regulations.----------

d. Proposal for agenda of the meeting from shareholder as referred to in a) hereof shall constitute agenda that require the resolutions of the GMS, and according to the Board of

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Directors' opinion the same have fulfilled any requirements as referred to in c) hereof.-------

e. The Company shall be obliged to state the proposal for agenda of the meeting from shareholder as referred to in a) hereof in the agenda of the meeting included in the summons.----------

(7) Summons for the GMS shall be made under the following terms:----------

a. The Company shall be obliged to make summons to shareholders within no later than 21 (twenty one) days before the GMS, excluding the day of the summons and the day of the GMS.----------

b. Summons for the GMS as referred to in a) hereof shall at least state any information on:----------

1) date of the GMS held;----------

2) time of the GMS held;----------

3) place of the GMS held;----------

4) requirements for shareholders entitled to be present at the GMS;----------

5) meeting agenda including the explanation of each agenda;----------

6) material related to the meeting agenda being available for shareholders from the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

day of summons for the GMS until the holding of the GMS; and----------

7) shareholder which may grant powers via e-RUPS (e-GMS).----------

c. Summons for the GMS to shareholders as referred to in a) hereof shall be made at least through:-

1) website which provides e-RUPS (e-GMS);------

2) website of the Stock Exchange; and----------

3) website of the Company.----------

in Indonesian Language and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.----------

d. Summons using foreign language must contain same information as that in summons using Indonesian Language.----------

e. In the event there is any difference of interpretation to information announced in foreign language to that in Indonesian Language, then information in Indonesian Language shall serve as reference.----------

f. Summons for the GMS, to decide transaction that contains the conflict of interest shall be made by following Capital Market regulation.-

g. Without prejudice to any other provisions of these Articles of Association, Summons must be made by the Board of Directors or the

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Board of Commissioners according to method set forth in these Articles of Association, in due observance of Capital Market regulation.-

h. Provisions in a) until e) hereof shall, mutatis mutandis, apply to summons for holding of the GMS by shareholder confirmed by court judgment to hold the GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) n) hereof.----------

(8) Summons for the second GMS shall be made under the following terms:----------

a. Summons for the second GMS shall be made within no later than 7 (seven) days before the second GMS is held;----------

b. In the summons for the second GMS, you must state that the first GMS has been held but didn't reach attendance quorum. This provision shall be applicable without prejudice to any Capital Market regulation and any other laws and regulations, and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are listed.----------

c. The second GMS shall be held within no earlier than 10 (ten) days and within no later than 21 (twenty-one) days after the first GMS is held;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

d. Provisions on summons media and rectified summons for the GMS as referred to in paragraph (7) c) until g) and paragraph (11) hereof shall, mutatis mutandis apply to summons for the second GMS.----------

(9) Summons for the third GMS shall be made under the following terms:----------

a. Summons for the third GMS shall, at the request of the Company, be determined by OJK (the Financial Service Authority).----------

b. In the summons for the third GMS, you must state that the second GMS has been held but didn't reach attendance quorum.----------

(10) Material for the meeting agenda shall be set forth under the following terms:----------

a. The Company must provide material for the meeting agenda to shareholders, accessible or downloadable, via the Company website and / or e-RUPS (e-GMS).----------

b. Material for the meeting agenda as referred to in a) hereof must be made available from the date of summons for the GMS until the GMS.----------

c. In the event any other laws and regulations specify provisions for earlier availability of material for the meeting agenda compared

FIKRI SAID SUDEP
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

to those referred to in b) hereof, then provision of material for the meeting agenda shall follow the other laws and regulations.----

d. In the event the GMS is a GMS that is only attended by Independent Shareholders, then the Company shall be obliged to provide statement form duly stamped for signing by the Independent Shareholders before the GMS, at least stating that:----------

1) the shareholders concerned are truly the Independent Shareholders; and----------

2) if in the future proved that the statement is not true, the shareholders concerned may be subject to sanction pursuant to the provisions of the laws and regulations.-

(11) Rectified Summons for the GMS may be made under the following terms:----------

a. The Company shall be obliged to make the rectified summons for the GMS if there is any change of information in the summons for the GMS as referred to in paragraph (7) b) hereof.----------

b. In the event the rectified summons for the GMS as referred to in a) hereof contains information on the change of date of the GMS and / or the addition of the GMS agenda,

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the Company shall be obliged to make re-summons for the GMS under the procedures of summons as set forth in paragraph (7) hereof.----------

c. If the change of information on the date of holding of the GMS and / or the addition of the GMS agenda are made neither because of the Company mistake nor upon the Financial Service Authority (OJK) instruction, then obligation to make re-summons for the GMS as referred to in b) hereof shall be inapplicable, insofar the Financial Service Authority doesn't instruct the re-summons.------

d. Proof of rectified summons not the mistake of the Company as referred to in c) hereof shall be submitted to OJK (the Financial Service Authority) on the same day when the rectified summons is made.----------

e. Provisions on media and submission of the proof of summons for the GMS as referred to in paragraph (7) c) and f) hereof shall, mutatis mutandis apply to the media of rectified summons for the GMS and the submission of proof of rectified summons for the GMS as referred to in a) hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

-------- **CHAIRMANSHIP, CODE OF CONDUCT, MINUTES OF** -------

-------- **THE GMS AND SUMMARIZED MINUTES OF THE GMS** -------

---------- **ARTICLE 24** ----------

(1) GMS shall be chaired by the Chairperson of the GMS under the following terms:----------

a. Chairperson of the GMS shall be a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.----------

b. In the absence or unavailability of all members of the Board of Commissioners, then the GMS shall be presided over by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.----------

c. In the absence or unavailability of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as referred to in a) and b) hereof, the GMS shall be chaired by shareholder being present at the GMS, appointed from and by participants of the GMS.----------

d. In the event the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest to agenda to be decided at the GMS, then the GMS shall be chaired by any other member of the Board of Commissioners.

FIKRI SAID CIPTA
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

having no conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners.----------

e. In the event all members of the Board of Commissioners have the conflict of interest, the GMS shall be presided over by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.----------

f. In the event one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors to preside over the GMS has a conflict of interest to agenda to be decided at the GMS, then the GMS shall be chaired by any other member of the Board of Directors having no conflict of interest.----

g. In the event all members of the Board of Directors have the conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of non-controlling shareholders appointed by the majority of other shareholders being present at the GMS.----

h. Chairperson of the GMS shall be entitled to request those being present prove their authorities to be present at the GMS and / or request that the power of attorney to represent shareholder is shown to me.----

(2) The Company shall be obliged to hold the GMS under the following code of conduct:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

a. At the time of holding of the GMS, the code of conduct of the GMS must be provided to shareholders being present.----------

b. Principles of the code of conduct of the GMS as referred to in a) hereof must be read out before the GMS begins.----------

c. At the time of opening of the GMS, the chairperson of the GMS must provide explanation to shareholders, at least, regarding:----------

1) the general condition of the Company briefly

2) the meeting agenda;----------

3) the mechanism of decision making related to the meeting agenda; and----------

4) procedures for exercise of rights of the shareholders to submit question and / or convey opinion.----------

(3) The Company shall be obliged to prepare the Minutes of the GMS under the following terms:-------

a. Minutes of the GMS shall be prepared in Indonesian Language.----------

The Minutes of the GMS serve as valid proof to all shareholders and any third party regarding any decisions and proceedings at the Meeting.

b. Minutes of the GMS must be prepared and signed by the chairperson of the meeting and at

IKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

least by 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS.----------

c. Signature as referred to in b) hereof shall not be required if the minutes of the GMS are prepared in the form of notarial by the notary public.----------

d. Minutes of the GMS as referred to in a) and b) hereof must be submitted to OJK (the Financial Service Authority) within no later than 30 (thirty) days after the GMS has been held.----------

e. In the event time for submission of the minutes of the GMS as referred to in d) hereof falls on holiday, the minutes of the GMS must be submitted at the latest on subsequent working day.----------

(4) The Company shall be obliged to prepare the Summarized Minutes of the GMS under the following terms:----------

a. The Summarized Minutes of the GMS shall contain any information, at least, on:----------

1) the date of the GMS, the place of holding of the GMS, the time of holding of the GMS, and the agenda of the GMS;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

2) the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners being present at the GMS;----------

3) the number of valid voting shares being present at the GMS and their percentage of total valid voting shares;----------

4) whether any opportunity or not for shareholders to submit questions and / or convey opinion relevant to the meeting agenda;----------

5) the number of shareholders who submit questions and / or convey opinion relevant to the meeting agenda, if the shareholders are given such opportunity;----------

6) the mechanism of decision making at the GMS;----------

7) the results of voting that cover the number of pro votes, contra votes, and abstaining votes (failing to cast vote) for each of the meeting agenda, if resolutions are adopted by voting;----------

8) the resolutions of the GMS; and----------

9) cash dividend payment to eligible shareholders, in case of any resolutions of the GMS regarding cash dividend distribution.----------

FIKRI ALI OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

b. Summarized minutes of the GMS available for shareholders as referred to in a) hereof may, at least, be accessed through:----------

1. website which provides e-RUPS (e-GMS);------

2. website of the Stock Exchange; and----------

3. website of the Company;----------

in Indonesian Language and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.----------

c. Announcement using foreign language must contain same information as that in announcement using Indonesian Language.----------

d. In the event there is any difference of interpretation to information announced in foreign language to that in Indonesian Language, then information in Indonesian Language shall serve as reference.----------

e. Announcement of the summarized minutes of the GMS as referred to in b) hereof must be published to the people within no later than 2 (two) working days after the GMS has been held.----------

f. Proof of announcement of the summarized minutes of the GMS as referred to in b) hereof must be submitted to OJK (the Financial

FIKRI SAID BEDJO
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Service Authority) within no later than 2 (two) working days after publication.----------

g. Provisions in paragraph (3) d) and e), and paragraph (4) b), e) and f) hereof shall, mutatis mutandis apply to:----------

1. submission to OJK, the minutes of the GMS and the summarized minutes of the GMS in publication; and----------

2) announcement of the summarized minutes of the GMS, from the holding of the GMS by shareholders, confirmed by court judgment to hold the GMS as referred to in Article 20 paragraph (4) n hereof.

----- **QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS OF THE GMS** ---

---------- **ARTICLE 25** ----------

(1) Insofar as not specified otherwise in these Articles of Association, quorum and the resolutions of the GMS with respect to any matters to be decided in the GMS shall comply with following conditions:----------

a. shall be attended by shareholders representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares and resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the Meeting, except that the Law and / or these

FIKRI SAID OSE
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Articles of Association determine the greater number of quorum.----------

b. in case of failure to reach quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid and entitled to adopt any binding resolutions if attended by shareholders representing at least 1/3 (one third) of total valid voting shares and resolutions shall be valid if approved by more than ½ (a half) of total voting shares being present at the GMS, except that the Law and / or these Articles of Association determine the greater number of quorum.----------

c. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company.----------

(2) GMS for agenda to transfer the Company assets or pledge the Company assets as a security for debt being more than 50% (fifty percent) of the

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Company's total net assets within 1 (one) or more transactions, correlated or not, shall be carried out as follows:----------

a. GMS must be attended by the shareholder of series-A share *Dwiwarna* and any other shareholders representing at least 3/4 (three fourths) of total valid voting shares and resolutions shall be valid if approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the GMS;----------

b. in case of failure to reach quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and/or their valid representatives collectively representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and resolutions shall be valid if approved by more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the GMS; and----------

c. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the

IKRI SAID OBE
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company, provided that the meeting must be attended and approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna*.----------

(3) GMS to approve any transaction having the conflict of interest shall be carried out under the following terms:----------

a. shareholder having the conflict of interest shall be considered to have made same decision as that approved by independent shareholder having no conflict of interest;----------

b. GMS shall be attended by independent shareholders representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares owned by independent shareholders and resolutions shall be valid if approved by independent shareholders representing more than ½ (a half) of total valid voting shares owned by independent shareholders.----------

c. in case of failure to reach quorum as referred to in b) hereof, then in the second GMS,

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

resolutions shall be valid if attended by independent shareholders representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares owned by independent shareholders and approved by more than 1/2 (a half) of total shares owned by independent shareholders being present at the GMS.----------

d. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in c) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by independent shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company; and----------

e. Resolutions of the third GSM shall be valid if approved by Independent Shareholder representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders being present.----------

(4) GMS to make change of the Board of Directors, change of the Board of Commissioner, amendment to these Articles of Association not requiring approval from Minister in field of Laws, the Issuance of Equity Securities and / or the Increase

FIKRI SHOBEDA
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of issued capital and paid-up capital shall be made under the following terms:----------

a. GMS must be attended by the shareholder of series-A share *Dwiwarna* and any other shareholders and/or their valid representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares and resolutions shall be approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the GMS.----------

b. In case of failure to reach quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing at least 1/3 (one third) of total valid voting shares and resolutions shall be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the GMS.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

c. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company, provided that the meeting must be attended and approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna*.----------

(5) GMS to make amendment to these Articles of Association which requires approval from Minister in charge of Laws shall be carried out under the following terms:----------

a. Amendment to these Articles of Association shall be decided by a GMS, attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and resolutions must be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

more than 2/3 (two thirds) of total voting shares being present at the GMS.----------

b. In case of failure to reach quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their representatives representing at least 3/5 (three fifths) of total valid voting shares and resolutions shall be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the GMS.----------

c. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company, provided that the meeting must be

FIRDAUS SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

attended and approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna*.----------

(6) In due observance of the laws and regulations, then Merger, Amalgamation, Takeover, Separation, submission of application for declaration of Insolvency of the Company, and Dissolution may be made only on the basis of the resolutions of the GMS, under the following terms:----------

a. Shall be attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing at least 3/4 (three fourths) of total valid voting shares and resolutions must be approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing at least 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the GMS.----------

b. In case of failure to reach quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their representatives representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and resolutions

FIRDI SAID OBAID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

shall be approved by the Shareholder of Series-A Share *Dwiwarna* and any other shareholders and / or their valid representatives collectively representing more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the GMS.----------

c. In case of failure to reach quorum on the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders of valid voting shares in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK (the Financial Service Authority) at the request of the Company, provided that the meeting must be attended and approved by the shareholder of series-A share *Dwiwarna*.----------

(7) Ones entitled to be present at the GMS shall be any shareholders whose names are recorded in the Register of the Company Shareholders, 1 (one) working days before the date of summons for the GMS in due observance of the prevailing laws and regulations and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are listed.--------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(8) In case of any rectified summons as referred to in Article 23 paragraph (11) a) hereof, shareholders entitled to be present at the GMS shall be any shareholders whose names are recorded in the register of the Company shareholders, 1 (one) working days before the rectified summons for the GMS.----------

(9) Shareholders shall, either personally or through their representative by virtue of the power of attorney, be entitled to attend a GMS, in due observance of the laws and regulations.----------

(10) The Company shall be obliged to provide alternative grant of powers electronically to shareholders to be present and cast vote t the GMS.----------

(11) a. Parties which may become Power Recipient Electronically shall include:----------

1. Participant who administers securities sub-account / securities owned by shareholder;----------

2. Party made available by the Company; or-----

3. Party appointed by shareholder.----------

b. The Company must provide the Power Recipient electronically as referred to in a) 2) hereof.--

(12) At the Meeting, each share shall give rights to its owner to cast 1 (one) vote.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(13) Shareholder with voting rights being present at the GMS but fails to cast vote (abstain) shall be considered to have cast same vote as the majority votes of shareholders who cast vote.-------

(14) In case of voting, any vote cast by shareholder shall apply to all shares owned and the shareholder shall not be entitled to grant powers to more than one proxy for a part of total shares owned with different vote.----------

This provision shall be excluded for:----------

a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its customers as the Company shareholder;----------

b. Investment Manager representing the interest of Mutual Fund he manages.----------

(15) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as Proxy at the Meeting, but in voting the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and / or the employees concerned shall not act as the proxy of shareholders.----------

(16) Voting shall be made orally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise.----------

(17) All resolutions shall be adopted on mutual consensus.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(18) In case of failure to achieve the mutual consensus, then resolutions shall be adopted on the basis of affirmative votes as set forth in these Articles of Association.----------

(19) Decision making through voting as referred to in paragraph (18) hereof must be carried out in due observance of provisions on quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS.----------

(20) At the GMS, the Company may invite any other parties relevant to the agenda of the GMS.----------

(21) The Company may hold a GMS electronically in due observance of the Regulation of the Financial Service Authority regarding the GMS of Public Company carried out electronically.----------

---------- **USE OF PROFIT** ----------

---------- **ARTICLE 26** ----------

(1) Use of net profit including the amount of allowance for reserve of loss shall be decided by the Annual GMS.----------

(2) Board of Directors must submit proposal to the Annual GMS with respect to the use of net profit not yet distributed and stated in balance sheet and profit-loss statement submitted to obtain the approval of the Annual GMS, which proposal can be stated how much net profit not yet distributed for allowance in reserve fund and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

proposal with respect to the amount of dividend to shareholders, or any other distribution, such as *tantiem* for the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners, bonus for employees, social fund reserve and any others that may be distributed, one and another, without prejudice to the rights of the GMS to determine otherwise.----------

(3) All net profit after deduction for allowance in reserve as referred to in paragraph (1) shall be distributed to Shareholders as dividend, unless determined otherwise by the GMS.----------

(4) a. Dividend shall be paid only according to the Company's financial capacity based on resolutions adopted in the Annual GMS, which resolutions must determine time, payment method and dividend form in due observance of the laws ad regulations in the field of Capital Market, and the regulation of the Stock Exchange where the Company share is listed.-----

b. In the event there are any resolutions of the GMS relevant to cash dividend distribution, the Company shall be obliged to make cash dividend payment to any eligible shareholders within no later than 30 (thirty) days after

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

publication of the summarized minutes of the GMS which decide cash dividend distribution.----

c. Dividend for shares shall be paid to person on behalf of who the share are recorded in the Register of Shareholders, on date determined by the Annual GMS which decides dividend payment.----------

d. payment day shall be announced by the Board of Directors to shareholders.----------

(5) Other than the use of net profit as referred to in paragraph (2) hereof, the GMS may decide the use of net profit for other distribution, such as *tantiem* for the Board of Directors, the Board of Commissioners, bonus for employees, provided that the Board of Directors must consult with the Majority Shareholder of Series-B Shares before asking for approval from the GMS with respect to the use of net profit for the other distribution.----------

(6) Dividend as referred to in paragraph (3) hereof may be distributed only if the Company has positive balance.----------

(7) Use of net profit for *tantiem* and bonus shall be done as long as not budgeted and not computed as the cost of current year.----------

FIKRI SAID SUSEDY
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(8) Dividend not yet taken within 5 (five) years from the date of decision for dividend payment shall be included in reserve fund specially used therefor.----------

(9) Dividend in such special reserve fund may be taken by eligible shareholders by submitting their proof of rights for the dividend acceptable by the Board of Directors of the Company on condition that the dividend can not be taken in lump sum and administrative fees will be charged in amount determined by the Board of Directors.-----

(10) Dividends which have been included in the special reserve fund as referred to in paragraph (8) hereof and not taken within 10 (ten) years will become the Company's rights.----------

(11) The Company may distribute interim dividend before the expiration of the Company's fiscal year if requested by Shareholder representing at least 1/10 (one tenth) of total shares issued, by noticing profit gain projection and the Company's financial capacity.----------

(12) Distribution of interim dividend shall be decided on the basis of the resolutions of the Board of Directors' Meeting after obtaining approval from the Board of Commissioners, in due observance of paragraph (10) hereof.----------

FIKRI SAID SOED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(13) If after the expiration of fiscal year the Company is found to have suffered lost, then the interim dividend which has been distributed must be returned by the Shareholders to the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be responsible individually and collectively for the Company loss, in the event the Shareholder fails to return the dividend interim as referred to in paragraph (11) hereof.----------

---------- **USE OF RESERVE FUND** ----------

---------- **ARTICLE 27** ----------

(1) The Company shall form obligatory reserve and other reserve.----------

(2) Allowance of net profit for reserve as referred to in paragraph (1) hereof shall be applicable if the Company has positive balance.----------

(3) Portion of profit provided for reserve fund shall be determined by the GMS in due observance of the laws and regulations. Allowance of net profit for obligatory reserve as referred to in paragraph (1) hereof shall be done until the reserve reaches at least 20% (twenty percent) of the issued and paid-up capital.----------

(4) Obligatory Reserve as referred to in paragraph (1) hereof not yet reaching amount as referred

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke Indonesia

to in paragraph (3) hereof may be used only for covering the Company loss that can not be covered by the other reserve.----------

(5) If obligatory reserve fund as referred to in paragraph (1) hereof has exceeded 20% (twenty percent), then the GMS may decide that the excess of the reserve fund will be used for the Company needs.----------

(6) Board of Directors must manage the reserve fund to obtain profit, in a manner deemed good by the Board of Directors and in due observance of the laws and regulations.----------

(7) Profit obtained from the reserve fund shall be included in the profit-loss statement.----------

-------- **AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION** --------

---------- **ARTICLE 28** ----------

(1) Amendment to these Articles of Association must observe Limited Liability Company Law and / or Capital Market Regulation.----------

(2) Amendment to these Articles of Association shall be decided by the GMS as set forth in Article 25 paragraph (4), and paragraph (5).----------

(3) Agenda for amendment to the Articles of Association must be stated clearly in the summons for the GMS.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

(4) Provisions of these Articles of Association regarding name, place, domicile of the Company, purposes and objectives, business activities, term of Company Incorporation, amount of authorized capital, reduction of issued and paid-up capital and change of status from Non-Public Company into Public Company or vice versa, must obtain approval from Minister in charge of Laws as referred to in Limited Liability Company Law.-------

(5) Amendment to these Article of Association, in addition to any matters set forth in paragraph (4) hereof shall be simply notified to Minister in charge of Laws in due observance of Limited Liability Company Law.----------

(6) Resolutions regarding the reduction of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and shall be published by the Board of Directors in daily newspaper using Indonesian language issued and / or circulated widely at the Company domicile within no later than 7 (seven) days from the date of the resolutions of the GMS regarding the reduction of capital.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

----- **MERGER, AMALGAMATION, TAKEOVER AND SEPARATION** ------

---------- **ARTICLE 29** ----------

(1) Merger, Amalgamation, Takeover and Separation shall be decided by the GMS under terms as set forth in Article 25 paragraph (6) hereof.----------

(2) Further provisions regarding Merger, Amalgamation, Takeover and Separation are contemplated in laws and regulations, particularly regulation in the field of Capital Market.----------

- DISSOLUTION, LIQUIDATION AND END OF LEGAL ENTITY STATUS-

---------- **ARTICLE 30**----------

(1) Dissolution of the Company may be carried out by virtue of the resolutions of the GMS with provisions set forth in Article 25 paragraph (6) hereof.----------

(2) If the Company is dissolved on the basis of the resolutions of the GMS or is declared dissolved by virtue of the Court judgment, then liquidation shall be done by liquidator.----------

(3) Liquidator shall be responsible to the GMS or court which appoints him for liquidation of the Company made.----------

(4) Liquidator shall be obliged to notify Minister in charge of Laws and announce the final results of liquidation process in newspaper after the GMS has granted discharge and acquittal to the

FIKRI SAID OBEID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Liquidator or after the Court which appoints the liquidator has accepted his accountability.---------

(5) Provisions regarding dissolution, liquidation and end of legal entity status of the Company shall be executed by observing laws and regulations, particularly provisions in the field of Capital Market.----------

---------- **DOMICILE OF SHAREHOLDERS** ----------

---------- **ARTICLE 31** ----------

In case of Shareholders related to the Company, the shareholders shall be considered to reside at address as recoded in the Register Book of Shareholders contemplated in Article 9 of these Articles of Association.----------

---------- **CLOSING PROVISIONS** ----------

---------- **ARTICLE 32** ----------

-Any matters not set forth or not sufficiently set forth in these Articles of Association shall follow Limited Liability Company Law, Capital Market Regulation, and any other laws and regulations and / or shall be decided in a GMS in due observance of the laws and regulations.----------

-Finally, the appearing person acting as mentioned above declares that:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Issued Capital as referred to in Article 4 paragraph 2 hereof has been subscribed for and paid up fully by the shareholders, under the following detail:----------

a. **Republic of Indonesia, 1 (one) Series-A Share *Dwiwarna***, in a nominal value of---------- **Rp. 50.00** (fifty Rupiah);----------

b. **PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persro), 4,841,053,951** (four billion eight hundred and forty-one million fifty-three thousand nine hundred and fifty-one) **Series-B Shares**, in a nominal value of---------- **Rp. 243,052,697,550.00** (two hundred and forty three billion fifty two million six hundred and ninety seven thousand five hundred and fifty Rupiah)----------

c. **PUBLIC, 2,606,699,502** (two billion six hundred and six million six hundred and ninety-nine thousand five hundred and two) **Series-B Shares**, in a nominal value of **Rp. 130,334,975,100.00**

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(one hundred and thirty billion three hundred and thirty-four million nine hundred and seventy-five thousand one hundred Rupiah);

Or totaling **7,447,753,456** (seven billion four hundred and forty-seven million seven hundred and fifty-three thousand four hundred and fifty-six) shares, in a total nominal value of---------- **Rp. 372,387,672,700.00**

(three hundred and seventy two billion three hundred and eighty seven million six hundred and seventy two thousand seven hundred Rupiah);----------

-Subsequently, the appearing person hereby grants power to me, the Notary Public with any rights to transfer the powers to any other person empowered to apply for approval and notification on amendment to these Articles of Association and notification on the change of the Company Data from appropriate agency and to make amendment and / or addendum in any forms required to obtain approval and receipt of the notification and to submit and sign any other applications and documents, to

FIKRI SAIFUDDIN
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Choose domicile and to take any actions that may be required.----------

The appearing person hereby declares and guarantees fully the authenticity of his identity according to identity card submitted to me, the Notary Public, and the appearing person has affixed his right thumbprint to appendix prepared separately, constituting a unit and an inseparable part of the Minutes of this Deed and furthermore the appearing person also declares that he has understood and comprehended the contents of this deed.----

---------- **IN WITNESS WHEREOF** ----------

-This Deed is made and executed in Jakarta, on day and date first written above, in the presence of:

1. -Madam FITRI RAHAYU, born in Jakarta, on 01-01-1969 (the first day of January one thousand nine hundred and sixty nine), an Indonesian Citizen, residing in Bekasi Municipality, Jalan Ayat Number 52, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 002, Community Unit of (Rukun Warga) 008, Jatimakmur Village, Pondokgede District, the holder of Resident National Identity Number 3725084101690057;----------
2. -Mister SABIKHAN, born in Purbalingga, on 17-11-1967 (the seventeenth day of November one thousand nine hundred and sixty seven), an Indonesian Citizen, residing in South Jakarta, Jalan Gandaria I Gg. Cemara, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Unit of (Rukun Warga) 008, Kramat Pela Village, Kebayoran Baru District, the holder of Resident National Identity Number 3174071711670009;----------

Both are the employees of the Notary Public Office, as witnesses.----------

-After I, the Notary Public, has read out this deed to the appearing person and witnesses, then the appearing person, witnesses, and I, the Notary Public immediately sign the same.----------

-Executed without any alteration.----------

-Original of this deed has been properly signed.----------

-ISSUED AS A COPY OF THE SAME WORDING-

[Stamped, sealed and signed]

(RINI YULIANTI, SH)

I, **FIKRI SAID OBED, S.S.**, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-16.AH.03.07 of 2024 and based on prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby declare and certify, in accordance with my oath of office, that the document is a true, faithful, and complete translation of the source document presented to me.

Jakarta, April 30, 2025

FIKRI SAID OBED PENERJEMAH TERSUMPAH B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

FIKRI SAID OBED, S.S.